

**STRATEGI INDONESIA DALAM MENDUKUNG EKSPOR CPO
MERESPONS KEBIJAKAN RED II OLEH UNI EROPA
TAHUN 2018-2023**

SKRIPSI

**Oleh
Raihan Arafı Suris
NPM 2116071102**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang diterapkan oleh Uni Eropa merupakan tantangan eksternal signifikan bagi industri kelapa sawit Indonesia. Melalui kriteria Indirect Land Use Change (ILUC), kebijakan ini mengklasifikasikan minyak sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi, yang berujung pada rencana penghapusan (phase-out) penggunaannya sebagai bahan baku biofuel hingga tahun 2030. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi respons Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan eksistensi ekspor Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional dengan menggunakan kerangka Rational Choice Theory (RCT). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta organisasi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RED II merupakan bentuk constraint (hambatan) yang memaksa Pemerintah Indonesia sebagai aktor rasional untuk melakukan kalkulasi untung-rugi guna memaksimalkan utilitas nasional. Strategi respons yang diambil mencakup tiga langkah utama: pertama, jalur litigasi melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai upaya menantang legitimasi hukum atas diskriminasi kebijakan Uni Eropa. Kedua, strategi diversifikasi pasar dengan melakukan penetrasi ekspor ke negara-negara non-tradisional di kawasan Asia dan Afrika guna mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa. Ketiga, penguatan pasar domestik melalui mandatori biodiesel serta sinkronisasi standar keberlanjutan melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui strategi tersebut, Indonesia berupaya memitigasi dampak negatif RED II dengan beralih ke pilihan-pilihan yang memberikan manfaat ekonomi dan kepastian hukum yang lebih stabil sesuai dengan kepentingan nasional.

Kata Kunci: CPO, RED II, Uni Eropa, Rational Choice Theory, Strategi Ekspor.

ABSTRACT

The Renewable Energy Directive II (RED II) policy implemented by the European Union represents a significant external challenge for the Indonesian palm oil industry. Through the Indirect Land Use Change (ILUC) criteria, this policy classifies palm oil as a high-risk commodity for deforestation, leading to a planned phase-out of its use as a biofuel feedstock by 2030. This research aims to analyze the Indonesian Government's response strategies in maintaining Crude Palm Oil (CPO) exports in the international market using the Rational Choice Theory (RCT) framework. The research method employed is descriptive qualitative, with data collection conducted through literature reviews and official documents from the government and related organizations.

The results of the study indicate that the RED II policy serves as a constraint that compels the Indonesian Government, as a rational actor, to perform cost-benefit calculations to maximize national utility. The response strategies adopted include three primary steps: first, the litigation path through the World Trade Organization (WTO) as an effort to challenge the legal legitimacy of the European Union's discriminatory policy. Second, a market diversification strategy by penetrating exports to non-traditional countries in the Asian and African regions to reduce dependence on the European market. Third, strengthening the domestic market through biodiesel mandates and the synchronization of sustainability standards via Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). This study concludes that through these strategies, Indonesia seeks to mitigate the negative impacts of RED II by shifting toward options that provide more stable economic benefits and legal certainty in accordance with national interests.

Keywords: CPO, RED II, European Union, Rational Choice Theory, Export Strategy

**STRATEGI INDONESIA DALAM MENDUKUNG EKSPOR CPO
MERESPONS KEBIJAKAN RED II OLEH UNI EROPA
TAHUN 2018-2023**

**Oleh
RAIHAN ARAFI SURIS**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **STRATEGI INDONESIA DALAM
MENDUKUNG EKSPOR CPO
MERESPONS KEBIJAKAN RED II OLEH
UNI EROPA TAHUN 2018-2023**

Nama Mahasiswa

: **Raihan Arafı Suris**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2116071102**

Jurusan

: **Hubungan Internasional**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP. 19920309 201903 2 020



Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19900606 201903 1 019

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Dr. Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



Sekretaris : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B.

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini Saya Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Raihan Arafı Suris

NPM. 2116071102

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Raihan Arafy Suris, lahir di Bengkulu pada tanggal 28 April 2002 yang merupakan anak bungsu dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Surya Dharma Bachtiar dan Ibu Lisni Arnety. Penulis memulai Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Witri I Bengkulu pada tahun 2008-2009, lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) 55 Kota Bengkulu pada tahun 2009-2015, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 18 Kota Bengkulu pada tahun 2015-2018 dan melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Bengkulu pada tahun 2018-2021. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan mengejar mimpinya sebagai mahasiswa di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung pada tahun 2021. Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif dan turut serta dalam kepanitiaan yang diadakan oleh organisasi, salah satunya Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJHI), berupa kegiatan funcamp pada tahun 2022 sebagai Liasison Officer, Lalu kegiatan PNMHII sebagai Kordinator Lapangan, dan beberapa kegiatan lainnya. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan Magang Mandiri di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Lalu penulis juga melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukaraja Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur pada 2024. Penulis Menjabat Sebagai Koordinator Desa pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

PERSEMBAHAN

Tulisan Ini saya Persembahkan Teruntuk Ayah, Ibu, Kakak dan Sahabat Tercinta
yang telah menemani dan memberikan dukungan Emosional selama masa
Pendidikan sampai di titik ini

Serta seluruh pembaca

MOTTO

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." – Filipi 4:13

*"Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan asalkan kau tidak berhenti." -
Konfusius*

"Create the life you can't wait to wake up to."

"Aut inveniam viam aut faciam"
I will either find a way or I will make one. – Hannibal Barca

*"Before you judge someone, walk a mile in his shoes." -Mocking Bird
Eminem*

"Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Kita sendirilah yang harus menempuh jalan itu." – Buddha Gautama

"There is nothing outside of yourself that can ever enable you to get better, stronger, richer, quicker, or smarter. Everything is within. Everything exists. Seek nothing outside of yourself." – Miyamoto Musashi

"No amount of money ever bought a second of time." – Tony Stark

"The hardest choices require the strongest wills." — Thanos, Avengers: Infinity War

"Not an end, just a beautiful beginning."

"Mind over matter."

"Look ma, I made it."

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Karena atas Izin, Rahmat dan serta Karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STRATEGI INDONESIA DALAM MENDUKUNG EKSPOR CPO MERESPONS KEBIJAKAN RED II OLEH UNI EROPA TAHUN 2018-2023”**. Yang merupakan tugas akhir di perkuliahan penulis guna memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung, Melalui tugas akhir ini penulis menuangkan segala hal yang telah penulis pelajari, dan memulai langkah selanjutnya dalam hidup penulis.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat-Nya dalam memberikan kemudahan baik selama penyusunan hingga menyelesaikan skripsi, serta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menuntun dari zaman kegelapan menuju jalan kemenangan;
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
5. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., Selaku dosen yang mengampu perkuliahan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa dan tidak bosan dalam membimbing, memberikan arahan, masukan baik pratikal maupun intelektual kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi. Kehadiran Mba Tety sebagai dosen jurusan Hubungan Internasional serta

pembimbing pertama penulis, sangat membantu penulis dan memberikan masukan dan inspirasi penulis untuk mencapai hal kedepan. Penulis sangat menghargai segala Ilmu dan masukan yang telah diberikan kepada penulis;

6. Mas Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sangat tulus dan sebesarbesarnya atas waktu, kesabaran, ketulusan, dan kebaikan yang telah diberikan selama membimbing hingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
7. Dr. Suripto, S.Sos., M.AB. selaku Dosen Penguji yang telah memberi ilmu, waktu, saran serta masukan kepada penulis terkait penulisan skripsi. Terima kasih banyak sudah membantu dan mengapresiasi penulis dalam penulisan skripsi, banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, dan memberikan kepercayaan kepada penulis;
8. Bang Hasbi Sidik S.IP. M.A, Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu memberikan arahan serta masukan sejak awal perkuliahan, banyak hal yang telah didiskusikan dan memberikan sudut pandang baru dalam banyak hal;
9. Mba Dr. Arie Fitria, S.IP., M.T., D.E.A., selaku dosen pengampu perkuliahan dan telah bersedia menjadi rekan diskusi dalam menentukan alur skripsi sebelum pengajuan skripsi, serta telah memberikan banyak motivasi dan sudut pandang dalam penentuan arah skripsi yang akhirnya akan saya bahas sebagai topik tugas akhir.
10. Serta seluruh Dosen dan Staff Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, waktu, tenaga, dan bantuan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
11. Kepada kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Surya Dharma Bachtiar dan Ibu Lisni Arnety. Penulis sangat bersyukur telah memiliki kedua orang tua yang mendukung anak dengan sepenuhnya, mendidik, merawat, dan membekali hal-hal yang sangat baik dengan sepenuh hati, selalu mengajarkan arti

kehidupan,.selalu mengingatkan dan bersyukur untuk selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dukungan yang amat luar biasa selalu diberikan, sehingga hal tersebut menjadi bekal energi yang luar biasa juga. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua karna tidak menyerah dan selalu ada setiap titik kehidupan penulis. Penulis berahrap gelar ini dapat membanggakan kedua orang tua penulis. Harapan kedua orang tua penulis selalu menjadi orang yang berguna, baik kepada semua orang, bermanfaat, dan sukses dunia maupun akhirat;

12. Kepada kakak keempat penulis, uni Jennyfer Fransiska Suris. Penulis mengucapkan terimakasih yang amat dalam karna telah bersedia mendukung penuh penulis dalam menjalani perkuliahan, yang tiada lelah untuk memberikan penulis motivasi, sudut pandang, cara berfikir dan harapan untuk menjalani kehidupan perkuliahan, beribu kata yang tidak dapat penulis utarakan namun terimakasih adalah hal yang wajib penulis ucapkan. Tanpa kakak penulis tidak tau bagaimana jadinya. Banyak hal dan pengalaman yang kakak ajarkan kepada penulis, sehingga penulis dapat memilih dan mengambil keputusan-keputusan yang sangat berpengaruh kepada kehidupan penulis kedepannya. Terimakasih atas dukungan, kesabaran serta motivasi yang telah diberikan. Maaf jika penulis belum sempurna dan belum bisa melakukan sesuai yang Uni harapkan, penulis akan berusaha lebih baik lagi guna memenuhi ekspektasi dan menjadi adik yang membanggakan;
13. Kepada kakak ketiga penulis, Sulaiman Surya Putra. Penulis mengucapkan terimakasih yang teramat mendalam karna telah bersedia memberikan dukungan kepada penulis serta menjadi rekan curhat yang memberikan penulis sudut pandang baru dan membukakan jalan terhadap kehidupan penulis semasa perkuliahan, Dukungan Materil maupun Dukungan Emosional yang memberikan penulis rasa aman sehingga penulis dapat menjalankan amanat yang telah diberikan oleh Ibu dan Uni.

14. Kepada kakak pertama dan kedua penulis, Fauzan Suris dan Rahadian Suris, penulis sangat berterimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menjalani skripsi, perjalanan selama kuliah, maupun dalam kehidupan;
15. Untuk Nuriskita Farahdila, terimakasih telah menjadi rekan saya selama kehidupan perkuliahan, senantiasa mendukung dalam kehidupan perkuliahan menjadi rekan berbagi cerita dan diskusi dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kehidupan perkuliahan saya. Anda mengajarkan saya banyak sekali hal yang kelak menjadi motto hidup penulis. Waktu yang dihabiskan tidak sebentar tetapi cukup untuk mengajarkan banyak hal, hampir seluruh kehidupan kuliah penulis habiskan waktu ditemani anda.
16. Untuk sahabat-sahabat penulis Putri Sion Nababan, Naufal Marantha, Muhammad Revaldo Alwi, Fiqri Qurahman Tanjung, Chytia Ike Ratu, Raffi Putra, Rahmalia Intana penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk menjadi teman pertama penulis di perkuliahan hingga saat ini;
17. Untuk sahabat-sahabat penulis di “Anak-Anak Rahasia Islami” selama perkuliahan sekaligus teman seperjuangan, yaitu Arganto Davinandito, Ahmad Zulvan, Adnan Kasma Abbysama, Braja Pratama Putra, Belva Mahardika, Evan Naufal, Farhan Dwi Putra, Ghulam Dzaky Aditya Gumah, I Ketut Gede Rama Sugardha, Michael Risky, Putra Swara, Rama Putra, Akhmad Ilham Umary. Terima Kasih atas dukungan dan bantuan yang kalian berikan selama masa perkuliahan. Terima kasih sudah selalu menjadi sahabat penulis dan menjadi sahabat didalam suka maupun duka, dan penulis berharap persahabatan ini tetap abadi hingga maut memisahkan;
18. Rahma Melya Dwi Anggraini, Terimakasih penulis ucapkan atas semua dukungan dan bantuan yang selalu diberikan. Terimakasih juga atas masakan-masakan yang selalu dibuatkan sehingga penulis menjadi semangat untuk mengerjakan skripsi. Terimakasih untuk tetap menjadi matahari didalam hidup

penulis sehingga penulis tidak kehilangan cahaya yang menerangi, serta menjadi candaan-candaan yang selalu menenangkan hari. Di akhir masa kuliah yang menjadi transisi antara titik kehidupan yang sangat padat, sibuk, dan melelahkan ini Penulis tetap bersemangat dalam menjalani semua tugas dan amanat yang telah diberikan.

19. Raihan Arafı Suris. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Terimakasih tetap bertahan, berusaha dan melangkah maju dalam setiap proses yang dijalani. Dengan ini saya dapat menentukan langkah selanjutnya, dengan ini juga saya dapat mengejar mimpi saya di anak tangga selanjutnya.

Terakhir, tanpa semua dukungan oleh orang-orang diatas penulis merasa tidak tahu apakah dapat sampai pada titik ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit banyaknya penulis memiliki harapan bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua, Terimakasih.

Bandarlampung, 22 Mei 2026

Raihan Arafı Suris
NPM. 2116071102

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	2
ABSTRACT	3
DAFTAR ISI	4
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori : Rational Choice Theory.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran	30
III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4 Sumber Data	35
3.5 Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN	38
4.1 Renewable Energy Directive II (Red II) Sebagai Constraint Uni Eropa	38
4.1.1 Evolusi Kebijakan Energi Terbarukan UE: Dari RED I ke RED II.....	38
4.1.2 Mekanisme Indirect Land Use Change (ILUC) dan Delegated Regulation2019/807.....	41
4.1.3 Implikasi Kebijakan RED II terhadap Utilitas Nasional Indonesia	42
4.2 Strategi Indonesia Menghadapi Kebijakan RED II Uni Eropa.....	43
4.2.1 Strategi Diversifikasi Pasar	44
4.2.1.1 Penetrasi Pasar CPO ke India.....	49
4.2.1.2 Penetrasi CPO ke Pasar China.....	57
4.2.1.3 Pakistan dan Bangladesh	62
4.2.3 Sertifikasi CPO Sebagai Bagian Dari Respons Terhadap RED II.....	72

4.4.1 Gugatan Pemerintah Indonesia ke World Trade Organization (WTO)	80
BAB V KESIMPULAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 20 Negara Importir CPO dari Indonesia Sebelum RED II 2015-2018	44
Tabel 2. 20 Negara Importir CPO Sesudah Berlaku RED II Periode 2019-2024	46
Tabel 3. Perbandingan Penetrasi Pasar Ekspor CPO Indonesia ke 4 Negara Asia	73
Tabel 5. Penemuan Pelanggaran oleh Panel WTO dalam DS593	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan	4
Gambar 2. Total Kuantitas Ekspor Cpo Indonesia Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025.....	4
Gambar 3. Total Nilai FOB Ekspor CPO Indonesia berdasarkan Negara Tujuan.....	6
Gambar 1. Grafik Penurunan Volume Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa setelah RED II.....	48
Gambar 2. Grafik Ekspor CPO Indonesia ke 4 Negara Asia Sumber: Diolah oleh penulis dari (Trade Map, 2025).	51

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya hambatan terhadap ekspor CPO Indonesia melalui kebijakan Renewable Energy Directive II Uni Eropa merupakan dinamika sangat penting dalam lanskap perdagangan internasional dewasa ini. Kebijakan RED II Uni Eropa yang bersifat proteksionis ini secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai pembatasan atau hambatan yang dengan sengaja diciptakan oleh Uni Eropa untuk melindungi industri domestik mereka dengan cara memberikan batasan impor atas produk Crude Palm Oil dari Indonesia. Kebijakan ini telah memunculkan tantangan tersendiri bagi Indonesia mengingat pada CPO sebagai salah satu komodisasi ekspor utama penopang perekonomian nasional. Ekonomi diplomasi Indonesia tercatat menghadapi tantangan besar akibat restriksi ekspor CPO yang diberlakukan Uni Eropa, khususnya terkait isu lingkungan dan keberlanjutan (Krisnandiva, 2019). Larangan ekspor CPO di negara-negara Uni Eropa juga telah mengakibatkan nilai ekspor dan mengganggu stabilitas perekonomian perdagangan internasional Indonesia (Batara dkk., 2024). Hambatan dagang tersebut bahkan teridentifikasi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pada sektor perkebunan dan industri pengolahan CPO (Purnama dkk., 2022). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan kebijakan RED II Uni Eropa bersifat proteksionis tidak hanya berdampak terhadap neraca perdagangan Indonesia, tetapi juga memperkeruh iklim investasi dan peluang kerja di sektor terkait karena CPO merupakan tulang punggung perekonomian di banyak daerah sentra sawit.

Penerapan kebijakan RED II yang semakin ketat mempertegas pentingnya respons strategis Indonesia demi menjaga keberlanjutan ekspor CPO ke pasar global. Daya saing ekspor CPO Indonesia semakin tertekan akibat berbagai hambatan tarif maupun nontarif yang diberlakukan Uni Eropa, di mana isu keberlanjutan lingkungan sering dijadikan dasar pembatasan perdagangan (Susanto, 2020). Dalam Kebijakan RED II, salah satu dampak yang paling signifikan adalah pembatasan penggunaan biodiesel berbahan dasar kelapa sawit karena komoditas ini dikategorikan sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap

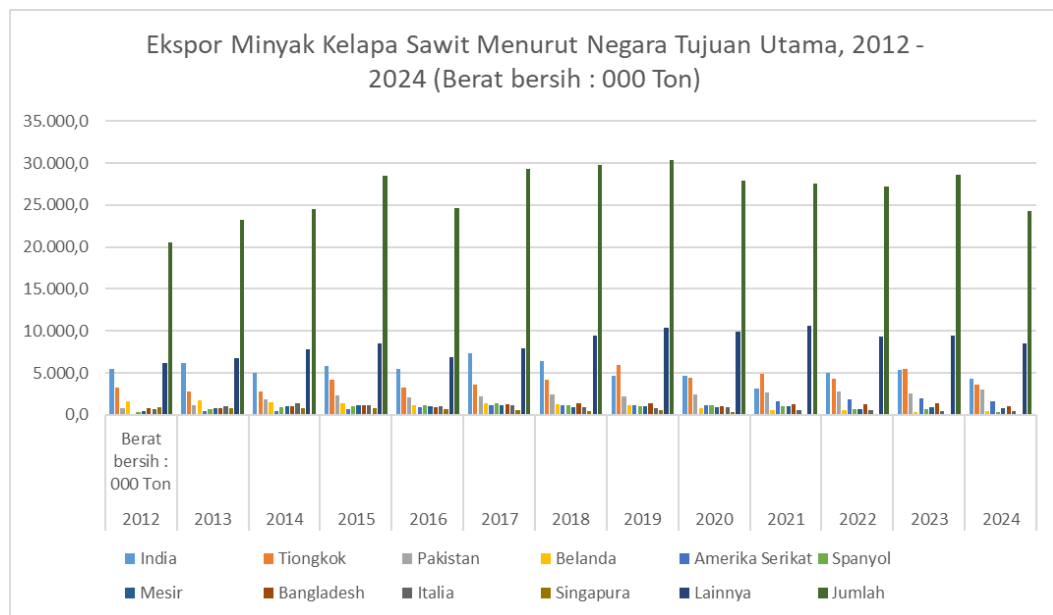
Indirect Land Use Change (ILUC), yang dinilai berpotensi meningkatkan deforestasi serta tidak sesuai dengan target keberlanjutan yang ditetapkan Uni Eropa (Arifin, Audina, & Putri, 2019). Melalui klasifikasi ILUC tersebut, Uni Eropa membedakan tanaman berisiko rendah seperti minyak bunga matahari dan berisiko tinggi seperti kelapa sawit, sehingga menempatkan CPO Indonesia dalam posisi yang kurang menguntungkan (Tyson & Meganingtyas, 2022). Kondisi ini menunjukkan urgensi bagi Indonesia untuk mengadopsi pengelolaan sawit yang lebih berkelanjutan guna memperkuat posisi tawar di pasar internasional (Fatima et al., 2024), sekaligus mengintensifkan langkah diplomasi agar kebijakan proteksionis Uni Eropa tidak semakin menghambat arus ekspor CPO (Nugraha, 2021). Di sisi lain, ketidakpastian pasar akibat kebijakan RED II juga memberikan dampak lanjutan terhadap kesejahteraan petani sawit di tingkat lokal, sehingga problematika ini menuntut strategi yang lebih inovatif dari pemerintah agar sektor CPO tetap mampu berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional (Zein & Sari, 2022).

Ketegangan yang terjadi antara kepentingan ekonomi Indonesia dalam mengeksport CPO dan penerapan kebijakan RED II Uni Eropa yang bersifat proteksionis mencerminkan kompleksitas hubungan perdagangan internasional yang juga melibatkan isu keberlanjutan dan lingkungan hidup. Kontradiksi ini semakin jelas ketika upaya nasional untuk meningkatkan devisa dari sektor CPO harus menghadapi hambatan non-tarif yang diberlakukan secara selektif, sehingga menimbulkan persepsi diskriminasi

terhadap salah satu komoditas unggulan Indonesia. Uni Eropa tampak konsisten dalam memperketat akses pasar CPO Indonesia melalui regulasi lingkungan yang dinilai memiliki nuansa proteksionis terselubung (Safitri dkk., 2021). Kebijakan sawit tersebut terbukti tidak hanya mempengaruhi volume ekspor nasional, tetapi juga menekan daya saing industri dalam negeri (Suwarno, 2019). Lebih jauh lagi, pembatasan perdagangan ini berpotensi mengurangi kontribusi CPO terhadap penerimaan negara serta menurunkan kesejahteraan para pelaku usaha dan petani sawit di daerah sentra produksi (Rais, 2023). Sejumlah literatur mengaitkan kebijakan proteksionis ini dengan upaya Uni Eropa melindungi industri minyak nabati

substitusi mereka, seperti minyak bunga matahari dan kedelai, di tengah meningkatnya kompetisi pasar global. Tak jarang, narasi keberlanjutan lingkungan dijadikan dalih untuk menerapkan regulasi diskriminatif yang menyulitkan akses ekspor CPO dari Indonesia. Secara empiris, situasi ini menunjukkan akumulasi tekanan eksternal terhadap pemerintah dan pelaku industri sawit untuk beradaptasi dan menyusun strategi baru guna memastikan keberlangsungan ekspor CPO Indonesia di pasar global.

Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia dengan total produksi sekitar 47 juta ton. Jumlah ini jauh melampaui Malaysia yang memproduksi sekitar 19 juta ton, serta Thailand yang menghasilkan sekitar 3,45 juta ton (U.S. Department of Agriculture, 2024). Perbandingan tersebut menunjukkan betapa dominannya Indonesia dalam industri kelapa sawit global, dengan kontribusi mencapai 59% dari total produksi CPO dunia (U.S. Department of Agriculture, 2024). Selain memenuhi kebutuhan domestik, CPO Indonesia juga dipasarkan ke berbagai negara, termasuk kawasan Uni Eropa. Negara-negara Eropa seperti Belanda, Italia, Jerman, dan Spanyol secara konsisten menjadi tujuan ekspor CPO Indonesia sejak tahun 1995 hingga 2020 (Tandra et al., 2021). Tidak hanya itu, Uni Eropa—bersama Cina dan Jepang—termasuk dalam tiga pasar terbesar bagi ekspor CPO Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012).



GAMBAR 1. DATA EKSPOR BERDASARKAN NEGARA TUJUAN

SUMBER : Data Badan Pusat Statistik 2025



Gambar 2. Total Kuantitas Ekspor CPO Indonesia Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Visualisasi data di atas merepresentasikan ekspor CPO Indonesia berdasarkan beberapa negara tujuan, terutama yang memiliki kuantitas ekspor paling besar dibanding negara-negara lainnya, data tersebut menyajikan data dari 2012-2024. Berdasarkan data tersebut, secara kuantitas atau jumlah ekspor CPO Indonesia tidak mengalami fluktuasi yang begitu signifikan, dengan India dan Tiongkok sebagai negara sebagai importir terbesar dari CPO Indonesia sebesar 6.415.800 Ton dan 4.216.400 pada 2018 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025). Disusul dengan Pakistan, Belanda, Amerika, Spanyol, Mesir, Bangladesh, dan Italia. Seperti yang kita ketahui 3 negara yang berasal dari Peserikatan Uni Eropa. Uni Eropa merupakan Pasar ke 3 terbesar yang menerima Ekspor CPO dari Indonesia 3.3 juta Ton, yang mana hal tersebut sangat berdampak kepada perekonomian industri CPO di Indonesia. Tetapi jika dilihat dari total kuantitas Justru di periode 2017-2019 volume ekspor CPO dari 29,4 juta Ton naik ke 30,3 Juta Ton, walaupun ditahun-tahun berikutnya turun lalu bertahan konsisten di 27 juta Ton selama 3 tahun berturut-turut.

Dampak implementasi RED II terlihat secara jelas melalui perubahan kinerja ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diberlakukan. Pembatasan terhadap produk berbasis kelapa sawit menyebabkan penurunan signifikan pada volume ekspor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebelum RED II diberlakukan pada 2017, ekspor CPO Indonesia ke Italia masih berada pada kisaran 1,1 juta ton. Namun, setelah kebijakan tersebut mulai berlaku, angka tersebut turun menjadi 899,8 ribu ton pada 2018 dan semakin merosot menjadi 753 ribu ton pada 2019. Pola serupa terjadi di Belanda, dengan penurunan dari 1,4 juta ton menjadi 1,2 juta ton pada 2018 dan 1,1 juta ton pada tahun berikutnya. Spanyol juga mengalami kontraksi impor, dari 1,377 juta ton pada 2017 menjadi sekitar 1,1 juta ton pada 2018 setelah RED II mulai diterapkan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025).

Penurunan tersebut tidak hanya terjadi pada volume, tetapi juga tercermin pada nilai ekspor. BPS mencatat bahwa nilai ekspor CPO Indonesia

ke Italia turun sebesar 19,39 persen, dari US\$ 494,5 juta pada triwulan I 2018 menjadi US\$ 398,6 juta pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan ke Belanda mencapai 16,73 persen, sementara ekspor ke Jerman mengalami kontraksi 12,81 persen. Secara agregat, total nilai ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa turun 15,86 persen dalam periode tersebut, dari US\$ 2,15 miliar menjadi US\$ 1,81 miliar (CNN Indonesia, 2019). Data ini mengindikasikan bahwa RED II bukan sekadar kebijakan berbasis lingkungan semata, melainkan berimplikasi langsung pada akses pasar Indonesia dan secara efektif meningkatkan hambatan non-tarif terhadap komoditas CPO. Dengan demikian, penurunan ekspor ini memperkuat argumen bahwa kebijakan RED II telah menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin rentan di pasar Uni Eropa dan mengharuskan adanya strategi respons yang lebih komprehensif dan adaptif dari pemerintah.



Gambar 3. Total Nilai FOB Ekspor CPO Indonesia berdasarkan Negara Tujuan

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tetapi berdasarkan visualisasi data diatas Dengan keseluruhan nilai FOB dalam kurun waktu tiga tahun setelah berlakunya RED II(2019-2021) Nilai FOB Ekspor CPO Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 16,1 Milliar USD pada 2019 dan naik menjadi 29,2 Milliar USD, Hal ini berbanding terbalik mengingat pada tahun 2019- 2021 itu masa mulai berlakunya RED II dan adanya isu global yaitu COVID-19. Peningkatan nilai

ekspor tersebut juga terlihat ketika ditinjau per negara tujuan. India, sebagai pasar utama, mencatat kenaikan nilai ekspor dari sekitar 2,25 miliar USD pada 2019 menjadi 3,33 miliar USD pada 2021. Tren serupa terjadi pada Tiongkok, meskipun sempat mengalami penurunan dari 3,02 miliar USD pada 2019 menjadi 2,87 miliar USD pada 2020, namun nilai ekspornya kembali melonjak signifikan pada 2021 hingga mencapai 4,8 miliar USD. Pakistan juga menunjukkan pola kenaikan yang konsisten, dari sekitar 1,1 miliar USD pada 2019 menjadi 2,7 miliar USD pada 2021.

Selain ketiga negara tersebut, beberapa negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat, Spanyol, Mesir, Bangladesh, Italia, dan Singapura juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor. Secara keseluruhan, akumulasi nilai FOB ke berbagai negara tersebut dalam periode tiga tahun tersebut terus menunjukkan pertumbuhan yang menonjol.

Permasalahan diskriminasi kebijakan yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan CPO menjadi isu yang cukup krusial mengingat besarnya ketergantungan ekonomi nasional terhadap komoditas ini. Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang diterapkan Uni Eropa telah berperan sebagai hambatan non-tarif utama yang membatasi ekspor CPO Indonesia dengan dalih keberlanjutan lingkungan (Saniyah, 2024). Selain itu, terdapat kecenderungan Uni Eropa menggunakan instrumen proteksi berbasis isu lingkungan, kesehatan, maupun keselamatan konsumen yang pada praktiknya justru menimbulkan perlakuan diskriminatif (Azlan, 2024). Indonesia bahkan menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip Most Favoured Nation (MFN) dalam WTO yang mewajibkan setiap negara memperlakukan mitra dagang secara setara tanpa diskriminasi, sehingga pembatasan terhadap penggunaan dan impor CPO dianggap melanggar prinsip tersebut (Sinaga & Foekh, 2021). Situasi ini menimbulkan dilema tersendiri bagi Indonesia terkait inkonsistensi dan ambiguitas kebijakan RED II, sehingga menuntut respons strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi pada sektor kelapa sawit. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menempuh berbagai langkah diplomasi dan kebijakan,

termasuk diplomasi ekonomi dalam merespons regulasi European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) sebagai bagian dari upaya mitigasi tekanan eksternal (Muhammad, 2024). Di saat yang sama, peran Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) turut memperkuat solidaritas negara-negara produsen guna menghadapi kecenderungan proteksionisme Uni Eropa (Safitri dkk., 2021).

Dengan demikian, ketegangan antara kepentingan ekspor Indonesia dan kebijakan RED II Uni Eropa yang dinilai diskriminatif menuntut adanya inovasi kebijakan dan penguatan diplomasi yang lebih adaptif agar sektor kelapa sawit tetap mampu bertahan dan berkontribusi bagi perekonomian nasional di tengah dinamika pasar global.

Menanggapi tekanan diskriminatif yang sistematis tersebut, Pemerintah Indonesia dapat dipahami sebagai aktor rasional yang tidak akan bersikap pasif ataupun terpaksa pada satu pendekatan kebijakan saja. Dalam perspektif Teori Pilihan Rasional, negara dipandang sebagai pengambil keputusan yang rasional; artinya, pemerintah akan menimbang berbagai alternatif kebijakan secara logis untuk mencapai hasil paling optimal bagi kepentingan nasionalnya (Green, 2002). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap tindakan dipilih berdasarkan perhitungan manfaat dan biaya (cost–benefit) yang cermat, dengan tujuan memaksimalkan utilitas kolektif atau keuntungan nasional jangka panjang (Sato, 2013). Paradigma aktor rasional ini sejalan dengan pandangan Allison dan Zelikow (1999) yang menggambarkan proses pengambilan keputusan negara sebagai serangkaian kalkulasi strategis untuk memperoleh hasil paling menguntungkan di tengah keterbatasan dan tekanan eksternal. Dengan demikian, kerangka Teori Pilihan Rasional memberikan landasan konseptual yang relevan untuk memahami mengapa pemerintah perlu merumuskan respons kebijakan yang adaptif dan inovatif—misalnya melalui kombinasi berbagai jalur strategi domestik maupun internasional ketika dihadapkan pada ancaman proteksionisme seperti kebijakan RED II Uni Eropa.

Sebagai tanggapan atas kebutuhan mendesak akan inovasi kebijakan dan penguatan diplomasi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melakukan telaah terhadap sejumlah literatur yang secara khusus membahas dinamika ekspor CPO Indonesia di tengah meningkatnya hambatan perdagangan non-tarif global, khususnya dari Uni Eropa yang menyoroti isu keberlanjutan dan lingkungan.

Dalam konteks ini, Nesadurai (2019) secara komprehensif meneliti peran tata kelola privat lintas negara dalam penerapan standar sawit berkelanjutan di Indonesia dan Malaysia, serta dampaknya terhadap pembangunan kawasan Asia Tenggara. Penelitian tersebut menekankan bagaimana keterlibatan aktor-aktor internasional mampu mendorong negara produsen untuk menerapkan standardisasi berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Dauvergne (2018) mengeksplorasi dinamika politik global di balik narasi ‘sustainable palm oil’, di mana kepentingan bisnis dan tekanan kebijakan dari aktor internasional kerap memengaruhi arah perdagangan kelapa sawit. Dalam kaitannya dengan isu diskriminasi, Rais (tanpa tahun) secara khusus membahas dampak kebijakan perdagangan diskriminatif Uni Eropa terhadap ekonomi Indonesia, dengan menyoroti besarnya tekanan ekonomi yang dihadapi. Sementara itu, Saniyah (2024) membahas strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespons regulasi Renewable Energy Directive II dari Uni Eropa, dengan menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan eksternal melalui proses negosiasi yang intensif. Kajian-kajian terdahulu ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai ekspor CPO Indonesia di tengah proteksionisme umumnya berfokus pada aspek tata kelola, tekanan kebijakan internasional, dan respons ekonomi, namun masih terdapat ruang untuk mengkaji strategi kebijakan pemerintah secara lebih menyeluruh sebagai respons komprehensif dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional

Sejalan dengan arah penelitian tersebut, Saeyang dan Nissapa (2021) juga menelaah daya saing produk kelapa sawit Indonesia dalam persaingan global bersama Malaysia dan Thailand, dengan menyoroti tantangan serta peluang strategis yang muncul akibat kebijakan RED II Uni Eropa.

Selain itu, Giacomini (2018) menelusuri aspek historis terbentuknya kluster ekspor minyak sawit di Asia Tenggara pada awal abad ke-20, yang menyoroti peran jaringan perdagangan dan kebijakan negara dalam mendukung keberlanjutan ekspor dari waktu ke waktu. Beragam temuan dari studi-studi sebelumnya memperlihatkan bahwa perlindungan ekonomi melalui kebijakan domestik maupun respons kolektif kawasan telah menjadi strategi umum untuk menghadapi tekanan eksternal.

Namun demikian, masing-masing penelitian cenderung berfokus pada aspek tertentu, seperti standar keberlanjutan, respons diplomasi, atau dinamika historis perdagangan, tanpa mengintegrasikan secara menyeluruh strategi kebijakan pemerintah dalam mendukung ekspor CPO di tengah tantangan Kebijakan yang dikeluarkan di pasar Uni Eropa saat ini. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis strategis yang komprehensif mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam merespons tekanan global terhadap ekspor kelapa sawit, sehingga dapat melengkapi kekurangan narasi pada studi-studi sebelumnya.

Dengan memperhatikan kekurangan narasi pada studi-studi sebelumnya, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif berbagai strategi kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam mendukung ekspor CPO di tengah peningkatan tekanan kebijakan RED II di tingkat global, khususnya dari Uni Eropa. Urgensi penelitian ini terletak pada konteks semakin intensifnya penerapan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, yang membawa konsekuensi krusial bagi kelangsungan devisa negara, stabilitas lapangan kerja, serta keberlanjutan penghidupan jutaan petani kecil yang sangat menggantungkan kesejahteraannya pada industri ini. Selain itu, signifikansi penelitian ini juga berada pada upaya untuk memberikan pemahaman terpadu mengenai kompleksitas isu proteksionisme yang kerap dibungkus narasi keberlanjutan lingkungan, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya mendalam, tetapi juga objektif dalam menilai motif di balik kebijakan pembatasan ekspor CPO yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Dengan demikian, pembahasan strategis mengenai langkah-langkah diplomasi, optimalisasi sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta penguatan posisi tawar dalam forum internasional dipandang sangat penting untuk menciptakan kerangka respons kebijakan yang tidak hanya defensif, tetapi juga proaktif menghadapi ancaman ekonomi dan hegemoni standar yang cenderung diskriminatif (Suroyo & Nangoy, 2019).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris dan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan menjaga hak Indonesia sebagai produsen utama *Crude Palm Oil* dunia dalam mengelola sumber daya alam secara berdaulat (Hasna, 2025). Relevansi analisis dalam konteks perlindungan ekonomi menjadi semakin signifikan mengingat besarnya peran sektor kelapa sawit bagi perekonomian nasional serta volatilitas pasar global akibat isu keberlanjutan dan geopolitik (BPDPKS, 2018). Dengan demikian, menghadirkan pembahasan yang integratif dan mendalam terkait strategi kebijakan pemerintah Indonesia tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap formulasi kebijakan publik yang lebih adaptif dan responsif menghadapi dinamika pasar global.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam lanskap perdagangan internasional yang kian dinamis, *Crude Palm Oil* tak hanya menjadi komoditas vital bagi perekonomian Indonesia, melainkan juga sorotan utama di tengah gelombang berlakunya kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang disuarakan Uni Eropa. Tantangan ini bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan perdebatan kompleks yang melibatkan isu keberlanjutan, lingkungan, hingga kepentingan ekonomi domestik. Di balik setiap regulasi pembatasan impor *Crude Palm Oil*, ada sebuah dilema besar bagi Indonesia, produsen dan eksportir terbesar dunia, untuk menjaga keberlangsungan sektor yang menopang jutaan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan suatu pertanyaan kunci “**Bagaimana Strategi Indonesia dalam mendukung ekspor CPO menghadapi**

Kebijakan RED II oleh Uni Eropa ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan apa itu *Renewable Energy Directive II* (RED II)
2. Menjelaskan Strategi Indonesia dalam menghadapi RED II

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian kebijakan perdagangan internasional, khususnya dalam memperkaya literatur terkait strategi respons negara berkembang terhadap dinamika ekonomi global, melalui analisis komprehensif terhadap kebijakan diplomasi ekonomi, pemenuhan standar keberlanjutan, serta peran kerja sama multilateral yang diimplementasikan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kinerja ekspor CPO di tengah tekanan regulasi eksternal, sehingga temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi konseptual dan acuan pengembangan teori dalam studi hubungan internasional, ekonomi politik, dan sustainable development.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu untuk memperkuat dan mendukung penelitian yang dilakukan, yaitu “Bagaimana STRATEGI INDONESIA DALAM MENDUKUNG EKSPOR CPO MENGHADAPI KEBIJAKAN RED II OLEH UNI EROPA ?”. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditujukan untuk memberikan landasan pemikiran yang kokoh, mengidentifikasi tema-tema kunci yang telah dieksplorasi, menemukan kesenjangan penelitian (research gap), serta memposisikan penelitian ini di antara kajian-kajian relevan yang telah ada. Kajian yang relevan mencakup analisis mengenai karakteristik praktik hambatan perdagangan melalui RED II oleh Uni Eropa, berbagai bentuk strategi respons kebijakan oleh Indonesia, hingga analisis kuantitatif mengenai dampak ekonomi dan daya saing CPO di pasar global.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bustanul Arifin dan Komang Audina Permana Putri (2019) dalam artikelnya *"Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest"* menyajikan analisis mendalam mengenai fase awal respons diplomatik Indonesia terhadap Resolusi Parlemen Uni Eropa tahun 2017. Melalui metode kualitatif yang mengandalkan studi kepustakaan dan wawancara dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri, penelitian ini membingkai respons Indonesia dalam teori Diplomasi Ekonomi, sembari menggunakan konsep Perdagangan Internasional dari Joseph Stiglitz untuk mengkritisi kebijakan Uni Eropa sebagai bentuk hambatan non-tarif yang tidak adil.

Hasil penelitiannya secara komprehensif mengidentifikasi bagaimana pemerintah mengorkestrasi empat strategi diplomasi lunak utama. Strategi tersebut meliputi penggalangan dukungan internasional melalui surat keberatan bersama negara-negara produsen sawit lainnya, pemanfaatan platform *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) untuk membentuk front persatuan dengan Malaysia, pelaksanaan diplomasi bilateral oleh Menteri Luar Negeri ke negara-negara kunci UE, serta penggunaan forum negosiasi formal *Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) untuk membahas isu keberlanjutan. Penelitian ini secara esensial memberikan gambaran detail mengenai pendekatan kooperatif dan persuasif yang menjadi fondasi awal kebijakan Indonesia. Keterbatasan analisisnya terletak pada cakupan waktu yang belum menangkap evolusi strategi ke arah yang lebih konfrontatif, sehingga membedakannya dari penelitian lain yang berfokus pada langkah-langkah yang lebih keras dan perkembangan isu pasca- 2019.

Kedua, penelitian oleh Mohammad Ichlas El Qudsi, et al., (2020) dengan judul "The Garuda Strikes Back: Indonesian Economic Diplomacy to Tackle European Union Protectionism on Crude Palm Oil" menawarkan perspektif yang berbeda dengan menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi proteksionisme Uni Eropa terhadap ekspor CPO, dengan fokus pada pendekatan asertif "Power-Play End." Menggunakan metode kualitatif dengan kerangka teori hubungan internasional, penelitian ini secara spesifik mendasarkan analisisnya pada tiga elemen diplomasi ekonomi, yaitu penggunaan pengaruh politik, pemanfaatan aset ekonomi, dan konsolidasi hubungan internasional untuk mengamankan kepentingan nasional (Qudsi et al., 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga melakukan "serangan balik" melalui penerapan strategi politik bersama Malaysia, diversifikasi pasar ekspor, serta penggunaan tekanan ekonomi—seperti larangan ekspor nikel—untuk menaikkan biaya konflik bagi UE. Selain itu, upaya membawa sengketa ke WTO memperlihatkan diplomasi

multilateral yang aktif (Qudsi et al., 2020). Namun, dalam temuan Qudsi et al. (2020) ditekankan pula adanya standar ganda dalam kebijakan Uni Eropa, yang menerapkan proteksionisme terhadap CPO sambil mempromosikan perdagangan bebas, meskipun komoditas lain terbukti menjadi pendorong deforestasi yang lebih besar (Qudsi et al., 2020). Meskipun memberikan analisis yang kuat, keterbatasan analisis pada perkembangan pasca-2020 membuat pembahasan mengenai efektivitas jangka panjang dari strategi tersebut menjadi kurang komprehensif, dan hal ini membedakannya dari penelitian saat ini yang dapat melihat perkembangan isu secara lebih utuh.

Ketiga, penelitian kuantitatif oleh Amzul Rifin, dkk. (2020) berjudul *"Assessing the impact of limiting Indonesian palm oil exports to the European Union"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak ekonomi pada Indonesia jika terjadi skenario penghentian ekspor CPO ke Uni Eropa. Dengan menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) dari *Global Trade Analysis Project* (GTAP), penelitian ini melakukan dua simulasi: penghentian total (100%) dan parsial (50%). Hasil utamanya menunjukkan bahwa penghentian ekspor tersebut tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi makroekonomi Indonesia secara keseluruhan, seperti PDB dan total ekspor. Namun, akan ada dampak negatif di tingkat sektoral industri sawit dalam jangka pendek, termasuk pada output, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan pelaku industri.

Keempat, penelitian oleh Ira Eka Pratiwi (2021) dengan judul *"The predictors of Indonesia's palm oil export competitiveness: A gravity model approach"* menyajikan analisis kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur daya saing ekspor CPO Indonesia sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penentu volume eksportnya ke lima negara tujuan utama, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, India, Belanda, dan Spanyol, untuk periode 2000-2019. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan ganda. Pertama, untuk mengukur daya saing, digunakan Indeks *Revealed Comparative Advantage* (RCA) yang berlandaskan pada teori Keunggulan Komparatif David Ricardo. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor penentu ekspor,

digunakan model regresi data panel yang dimodifikasi dari *gravity model*—sebuah teori dalam perdagangan internasional yang mengasumsikan arus perdagangan dipengaruhi oleh ukuran ekonomi dan jarak antar negara. Data sekunder untuk analisis ini dihimpun dari berbagai sumber internasional seperti UNCOMTRADE dan Bank Dunia. Hasil penelitian ini memberikan dua temuan utama. Pertama, dari analisis RCA, ditemukan bahwa Indonesia secara konsisten memiliki keunggulan komparatif yang kuat (*strong comparative advantage*) untuk ekspor CPO di kelima negara tujuan utama, dengan nilai indeks yang selalu lebih besar dari 4. Temuan ini mengonfirmasi posisi dominan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Kedua, hasil dari analisis *gravity model* menunjukkan bahwa terdapat lima variabel yang secara signifikan mempengaruhi nilai ekspor CPO Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah jarak ekonomi (berpengaruh negatif), PDB riil per kapita negara mitra (berpengaruh positif), keberadaan Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA (berpengaruh positif), dan nilai tukar riil (berpengaruh positif). Sementara itu, variabel lain seperti populasi negara tujuan, kesamaan bahasa, dan perbatasan bersama ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam model ini.

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya *gap* atau hasil yang berlawanan dengan teori umum, di mana variabel *Non-Tariff Measurements* (NTMs) atau hambatan non-tarif justru ditemukan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia. Pratiwi (2021) berpendapat bahwa hal ini bisa jadi disebabkan karena Indonesia, sebagai produsen utama, memiliki kapasitas untuk memenuhi standar yang diterapkan di pasar-pasar dengan permintaan tinggi, sehingga keberadaan NTMs tidak menjadi penghalang efektif. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada hambatan esensial yang membatasi ekspor CPO Indonesia ke negara-negara tujuan utamanya. Namun, sebagai kekurangannya, peneliti mengakui bahwa variabel NTMs yang digunakan tidak dipecah secara spesifik, sehingga sulit untuk menginterpretasikan dampak dari setiap jenis hambatan secara terpisah. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan kajian lain adalah fokusnya pada hasil statistik agregat, yang menawarkan perspektif berbeda dari studi

kualitatif yang lebih menekankan pada tantangan politik dan proses diplomasi dalam menghadapi NTMs tersebut.

Kelima, penelitian oleh Putri Sulistiawati (2023) dengan judul "*Analisis Pengaruh Konsumsi Domestik, Nilai Tukar Rupiah, dan Harga CPO Internasional terhadap Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia*" menyajikan analisis kuantitatif yang berfokus pada faktor-faktor ekonomi fundamental yang mendorong volume ekspor CPO dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana dinamika pasar domestik dan internasional mempengaruhi keputusan ekspor. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linear berganda terhadap data *time series* selama 31 tahun, yaitu dari periode 1991 hingga 2021. Landasan teorinya berasal dari prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, yang mengasumsikan bahwa volume ekspor suatu negara dipengaruhi oleh sinyal harga di pasar global (harga internasional dan nilai tukar) serta ketersediaan pasokan setelah pemenuhan kebutuhan dalam negeri (konsumsi domestik).

Analisis uji F menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel konsumsi domestik, nilai tukar rupiah, dan harga CPO internasional memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Namun, analisis parsial melalui uji t mengungkapkan dinamika yang lebih kompleks. Ditemukan bahwa konsumsi domestik memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap volume ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teori peningkatan konsumsi dalam negeri dapat mengurangi surplus untuk ekspor, dalam praktiknya fluktuasi ini tidak cukup kuat untuk menjadi penentu utama volume ekspor. Sebaliknya, dua variabel pasar internasional menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Nilai tukar rupiah ditemukan berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti pelemahan nilai tukar rupiah membuat harga CPO Indonesia lebih murah bagi pembeli asing, sehingga mendorong peningkatan volume ekspor. Demikian pula, harga CPO internasional juga berpengaruh positif dan signifikan, yang menegaskan bahwa insentif keuntungan dari harga

global yang tinggi merupakan pendorong utama bagi produsen untuk lebih memprioritaskan pasar ekspor (Sulistiawati, 2023). penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan ekspor CPO Indonesia lebih didorong oleh insentif harga di panggung global daripada oleh dinamika permintaan domestik. Namun, sebagai sebuah model ekonometrik, penelitian ini memiliki keterbatasan. Fokusnya yang hanya pada tiga variabel fundamental membuatnya tidak memasukkan faktor-faktor kebijakan perdagangan yang krusial, seperti hambatan non-tarif (NTMs) atau keberadaan perjanjian perdagangan bebas (FTA), yang dalam penelitian lain terbukti signifikan. Perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah pendekatannya yang murni makroekonomi dan berjangka panjang, yang berfungsi untuk memetakan perilaku dasar pasar. Ini menjadikannya berbeda dari studi kualitatif yang menganalisis strategi diplomasi atau studi CGE yang memodelkan dampak dari guncangan kebijakan spesifik, dengan memberikan pemahaman tentang fondasi ekonomi yang melandasi setiap intervensi kebijakan tersebut.

Keenam, penelitian oleh Meli Antika, dkk. (2024) dengan judul "*WTO DALAM KONTROVERSI PERDAGANGAN: PENINJAUAN KASUS BLACK CAMPAIGN UNI EROPA TERHADAP CPO (CRUDE PALM OIL) INDONESIA*" memberikan fokus yang spesifik pada salah satu pilar utama strategi perlawanan Indonesia, yaitu jalur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran *World Trade Organization* (WTO) sebagai mediator dalam sengketa dagang yang kompleks antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kampanye hitam terhadap CPO. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengandalkan data sekunder dari jurnal dan media massa. Kerangka teorinya bersifat ganda: Teori Hegemoni digunakan untuk menganalisis bagaimana Uni Eropa sebagai kekuatan dominan meluncurkan kampanye untuk menjatuhkan CPO Indonesia, sementara konsep Hukum Internasional digunakan untuk membingkai peran WTO sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan adil.

Penelitian ini secara rinci menguraikan narasi konflik dan proses penyelesaiannya di WTO. Ditemukan bahwa kampanye hitam dan regulasi Uni Eropa seperti *Renewable Energy Directive* (RED) dan RED II, yang didasarkan pada isu deforestasi dan lingkungan, dianggap oleh Indonesia sebagai bentuk proteksionisme untuk melindungi produk minyak nabati Eropa. Sebagai respons, Indonesia tidak hanya membantah tuduhan tersebut tetapi juga secara strategis memilih untuk membawa kasus ini ke WTO, sebuah langkah yang menempatkan sengketa dalam kerangka hukum internasional yang terstruktur. Penelitian ini kemudian memaparkan secara detail tahapan-tahapan dalam mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO (*Dispute Settlement Body*), mulai dari proses konsultasi awal, pembentukan panel ahli, proses banding ke Badan Banding (*Appellate Body*), hingga tahap implementasi dan pemantauan keputusan.

Temuan utamanya adalah bahwa hingga saat penelitian ini ditulis, proses tersebut masih berjalan dan belum mencapai kesimpulan akhir, menunjukkan kompleksitas dan panjangnya proses hukum di tingkat internasional (Antika et al., 2024). Penelitian ini secara efektif menyoroti adanya *gap* atau ketimpangan narasi antara kedua belah pihak, di mana Indonesia melihat isu ini sebagai proteksionisme ekonomi, sementara Uni Eropa membingkainya sebagai kebijakan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Meskipun memberikan gambaran yang sangat baik mengenai alur prosedural di WTO, keterbatasan utama penelitian ini adalah fokusnya yang sangat spesifik pada jalur hukum. Akibatnya, analisis ini kurang mengintegrasikan strategi gugatan ke WTO dengan upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah secara simultan, seperti diplomasi bilateral, penguatan aliansi CPOPC, atau kebijakan domestik seperti ISPO. Perbedaannya dengan penelitian lain terletak pada kontribusinya sebagai analisis hukum-prosedural yang mendalam, yang melengkapi studi-studi lain yang lebih berfokus pada aspek diplomasi politik atau dampak ekonomi.

Lalu, penelitian oleh Siti Zainurrahmi Br Bangun dan Muhammad Rasyid Ridho (2025) dengan judul "*Analysis of European Union Non-Tariff*

Trade Barriers on Crude Palm Oil Imports from Indonesia" memberikan dekonstruksi mendalam terhadap kebijakan Uni Eropa yang dianggap sebagai hambatan non-tarif. Studi ini bertujuan untuk membongkar berbagai hambatan perdagangan yang diberlakukan Uni Eropa, khususnya melalui penerapan *Renewable Energy Directive* (RED) II dan *Delegated Act 2019*. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan analisis data sekunder dari laporan pemerintah dan dokumen resmi yang diverifikasi melalui teknik triangulasi. Landasan teorinya menggunakan beberapa pendekatan sekaligus, seperti teori *Public Choice*, *Strategic Trade Policy*, dan perlindungan *Infant Industries*, untuk mengungkap berbagai kemungkinan motif proteksionisme ekonomi di balik regulasi lingkungan yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Hasil utama dari penelitian ini adalah argumen kuat bahwa justifikasi lingkungan yang digunakan oleh Uni Eropa pada dasarnya adalah bentuk proteksionisme yang dirancang untuk melindungi industri minyak nabati domestik mereka. Argumen ini didukung dengan menyajikan *gap* atau ketimpangan yang tajam antara narasi kebijakan Uni Eropa dengan data empiris. Penelitian ini secara rinci membandingkan data efisiensi yang menunjukkan bahwa kelapa sawit secara signifikan lebih unggul dalam hal produktivitas per hektar, penggunaan lahan, dan efisiensi energi dibandingkan dengan minyak nabati Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari. Meskipun demikian, hanya kelapa sawit yang menjadi target regulasi yang ketat, menunjukkan adanya pola bias dalam pembatasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti data yang menunjukkan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia telah menurun dan emisi gas rumah kaca dari sektor pertaniannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Uni Eropa (Bangun & Ridho, 2025).

Pada penjelasan lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa motif sebenarnya di balik kebijakan tersebut adalah persaingan bisnis dan tekanan politik, yang dibuktikan dengan adanya lobi kuat dari para petani Eropa dan fakta bahwa banyak anggota komite pertanian Parlemen Eropa memiliki

keterkaitan dengan sektor tersebut (Bangun & Ridho, 2025). Sebagai respons, Indonesia disebut telah memperkuat regulasi domestik seperti ISPO dan kebijakan perlindungan ekosistem gambut. Namun, keterbatasan dari penelitian ini adalah fokusnya yang lebih berat pada analisis masalah dari sisi Uni Eropa. Kajian ini cenderung belum mendalam menganalisis efektivitas implementasi dari berbagai strategi balasan yang telah dan sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia secara praktis. Dengan demikian, perbedaannya dengan penelitian lain adalah perannya sebagai fondasi kritis yang membedah akar masalah proteksionisme, yang menjadi justifikasi bagi berbagai strategi kebijakan Indonesia yang dianalisis dalam studi-studi lainnya.

Selanjutnya, penelitian oleh Aisyah Amira Haq (2024) dengan judul *"Analisis Dampak Larangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng di Indonesia"* mengalihkan fokus dari tekanan eksternal ke dinamika kebijakan internal. Berbeda dengan penelitian lain, studi ini menganalisis sebuah kebijakan domestik yang bersifat reaktif dan berjangka pendek, yaitu larangan ekspor CPO sementara yang diberlakukan pemerintah pada April 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari kebijakan mendadak tersebut terhadap ketersediaan minyak goreng di dalam negeri serta efek lanjutannya pada industri sawit nasional. Secara metodologis, kajian ini didesain dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengandalkan analisis data sekunder dari lembaga statistik resmi dan asosiasi industri. Kerangka teorinya sendiri berakar pada konsep dasar ilmu ekonomi, yaitu teori Permintaan dan Penawaran untuk menjelaskan krisis harga, serta teori Keunggulan Absolut untuk memberi konteks pada posisi Indonesia sebagai produsen CPO utama.

Hasil kajian ini menyoroti adanya sebuah *gap* atau dilema fundamental antara kepentingan domestik dan komitmen pasar ekspor. Ditemukan bahwa kebijakan larangan ekspor memang berhasil dalam tujuan jangka pendeknya, yaitu meningkatkan pasokan dan menurunkan harga minyak goreng di pasar domestik, sehingga memberikan kelegaan bagi masyarakat. Namun, konsekuensi utamanya adalah dampak negatif yang signifikan dan cepat

terhadap seluruh rantai industri sawit. Kebijakan tersebut menyebabkan penurunan drastis pendapatan bagi produsen dan eksportir, hilangnya daya saing Indonesia di pasar global karena pembeli beralih ke negara lain, serta munculnya risiko serius terhadap jutaan lapangan kerja petani dan buruh sawit. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan larangan ekspor tersebut dinilai tidak efektif dan tidak berkelanjutan, yang dibuktikan dengan pencabutannya hanya dalam waktu singkat pada 23 Mei 2022.

Meskipun menyajikan narasi yang runut mengenai krisis kebijakan tersebut, keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bersifat deskriptif. Kajian ini tidak menggunakan model kuantitatif untuk mengukur secara presisi besaran kerugian ekonomi yang dialami oleh negara maupun industri. Perbedaannya yang paling mendasar dengan penelitian lain adalah fokusnya pada manajemen krisis domestik yang reaktif, bukan pada strategi jangka panjang untuk menghadapi proteksionisme internasional. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi penting sebagai studi kasus mengenai kompleksitas dan trade-off kebijakan dalam negeri bagi negara yang ekonominya sangat bergantung pada komoditas ekspor.

Muhamad Yassar Naufal Subagja, Camelia Aprilianti, Nur Annisa Quraessin, dan Agnes Marianti Sormin (2025) dengan judul *"Dampak Pemberlakuan Kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Ekspor CPO dan Implikasinya pada Perekonomian Nasional"* menyajikan sebuah sintesis kualitatif yang komprehensif. Kajian ini bertujuan memetakan secara holistik bagaimana kebijakan RED II Uni Eropa berimplikasi pada industri CPO dan perekonomian Indonesia, sekaligus mendokumentasikan respons kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan pendekatan deskriptif yang mengandalkan berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah dan laporan media, penelitian ini membingkai analisisnya dalam konsep dasar Perdagangan Internasional dan Ekonomi Makro untuk menjelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor, perolehan devisa, hingga stabilitas nilai tukar.

Temuan utamanya menguraikan bagaimana kebijakan RED II secara langsung memicu penurunan volume ekspor CPO secara signifikan ke negara-negara penting di Uni Eropa, seperti Belanda, Spanyol, dan Italia, yang kemudian berimplikasi pada perekonomian makro. Penurunan ekspor ini tercatat berkontribusi pada menurunnya pendapatan devisa negara serta potensi berkurangnya kontribusi industri kelapa sawit terhadap PDB nasional.

Dampak ini tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga merambat hingga ke level akar rumput, secara khusus mengancam kesejahteraan jutaan keluarga petani kecil yang pendapatannya sangat bergantung pada stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS). Menghadapi dampak tersebut, penelitian ini mendokumentasikan portofolio respons kebijakan yang diorkestrasi oleh Pemerintah Indonesia. Respons ini tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan gabungan berbagai strategi yang mencakup protes diplomatik, penguatan standar keberlanjutan domestik melalui ISPO, pembentukan aliansi dengan negara produsen lain dalam misi bersama ke Brussel, hingga menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke WTO. Meskipun cakupannya luas, keterbatasan kajian ini adalah sifatnya sebagai tinjauan umum yang tidak menyelami efektivitas masing-masing strategi secara mendalam. Dengan demikian, kontribusinya yang utama adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara sebab (kebijakan RED II), akibat (dampak ekonomi-sosial), dan reaksi (respons kebijakan Indonesia), yang membedakannya dari studi-studi lain yang lebih terspesialisasi.

Terakhir, penelitian dari DH Azahari, dkk. (2024) yang berjudul *"Strategy for Increasing Exports of Indonesian Palm Oil"* mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu analisis strategis yang berorientasi ke depan untuk merumuskan kebijakan peningkatan ekspor CPO. Berbeda dengan studi lain yang menganalisis peristiwa masa lalu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi industri saat ini guna membangun strategi masa depan. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang dikombinasikan dengan kerangka SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Selain itu, daya saing diukur secara

kuantitatif melalui *Market Specialization Index* (MSI), dengan data yang dihimpun dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk BPS, Kementerian Perdagangan, dan FAO.

Hasil analisis kuantitatif MSI menunjukkan bahwa produk CPO Indonesia sangat kompetitif dan telah mencapai tahap kematangan ekspor (*export maturity*) di pasar global, dengan nilai indeks yang secara konsisten mendekati 1 (Azahari et al., 2024). Sementara itu, analisis SWOT mengidentifikasi beberapa faktor kunci. Kekuatan utama Indonesia terletak pada kondisi geografisnya yang ideal. Namun, hal ini diimbangi oleh kelemahan internal yang signifikan, terutama produktivitas petani kecil yang masih rendah jika dibandingkan dengan perkebunan besar milik swasta dan negara. Peluang bagi Indonesia terbuka lebar seiring dengan meningkatnya permintaan pasar internasional dan bertambahnya perjanjian perdagangan bebas. Akan tetapi, peluang ini dihadang oleh ancaman serius berupa hambatan non-tarif yang semakin marak dan stigma lingkungan yang terus-menerus melekat pada produk sawit Indonesia (Azahari et al., 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan serangkaian strategi yang bersifat multi-cabang. Rekomendasi tersebut mencakup diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional, optimalisasi riset dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi di sektor hulu sekaligus mendorong hilirisasi produk turunan, serta perbaikan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan (Azahari et al., 2024). Meskipun menyajikan kerangka strategis yang komprehensif, kekurangan dari penelitian ini adalah rekomendasi yang dihasilkan masih bersifat umum dan belum disertai rencana implementasi yang konkret. Perbedaan mendasar penelitian ini adalah sifatnya yang preskriptif atau berorientasi ke depan—fokus pada "apa yang seharusnya dilakukan"—yang menjadikannya berbeda dari studi-studi lain yang umumnya bersifat deskriptif ("apa yang telah terjadi") atau evaluatif ("bagaimana dampak dari suatu kebijakan").

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait dinamika ekspor CPO Indonesia, mulai dari peran lembaga internasional seperti WTO, analisis hambatan non-tarif dan regulasi Uni Eropa (termasuk RED II), dampak kebijakan domestik, evaluasi respons diplomasi, hingga penilaian daya saing ekspor menggunakan pendekatan kuantitatif dan strategis. Meski demikian, perhatian lebih mendalam terhadap implementasi nyata strategi kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghadapi tekanan kebijakan RED II Uni Eropa secara komprehensif,— meliputi hilirisasi industri, penguatan ISPO, diversifikasi pasar, diplomasi ekonomi dalam berbagai bentuk, serta evaluasi efektivitasnya—masih minim dijelaskan dalam studi-studi sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk menutup kekosongan analisis dengan menelaah secara kritis dan terintegrasi berbagai upaya konkret yang dijalankan pemerintah, tantangan faktual di lapangan, serta proses adaptasi strategi dalam konteks persaingan global industri sawit masa kini.

2.2 Landasan Teori : Rational Choice Theory

Rational Choice Theory (RCT) merupakan salah satu pendekatan analitis yang berpengaruh dalam ilmu sosial untuk memahami perilaku aktor dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini berakar pada pemikiran ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith, khususnya konsep *invisible hand* yang menggambarkan bagaimana individu yang mengejar kepentingan pribadi secara rasional dapat menghasilkan manfaat kolektif bagi masyarakat (Smith, 1976). Dalam perkembangannya, RCT telah diadopsi secara luas di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik dan hubungan internasional, untuk menganalisis perilaku negara sebagai aktor rasional yang berupaya memaksimalkan utilitas nasionalnya melalui kalkulasi strategis atas berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini, RCT digunakan sebagai kerangka utama untuk menjelaskan respons strategis Pemerintah Indonesia terhadap tekanan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa. Kebijakan RED II, yang membatasi penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel, dipandang sebagai kendala eksternal (*external constraint*) yang memaksa Indonesia untuk

melakukan kalkulasi biaya-manfaat guna merumuskan strategi optimal dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan jutaan petani sawit domestik.

Definisi dari Rational Choice Theory secara umum dapat dipahami sebagai kerangka pemikiran yang menekankan bahwa individu dalam setiap tindakannya selalu berupaya untuk memilih opsi terbaik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang mengitari pilihan tersebut (Green, 2002). Perspektif ini menempatkan individu sebagai agen rasional yang memperhitungkan manfaat dan konsekuensi dari setiap alternatif tindakan demi memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan preferensi mereka. Melalui pendekatan ini, teori ini memperlihatkan adanya keyakinan mendasar bahwa setiap aktor sosial dipandang memiliki kapasitas analitis dalam menimbang berbagai peluang serta risiko sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Asumsi mengenai pemilihan alternatif terbaik ini menjadi tulang punggung utama dari pemikiran Rational Choice Theory yang membedakannya dari teori-teori aksi sosial lainnya. Dengan kata lain, penekanan terhadap rasionalitas keputusan menjadi faktor sentral dalam memahami perilaku individu menurut kerangka teori ini. Oleh sebab itu, definisi tersebut menegaskan karakter dasar Rational Choice Theory yang berpusat pada peran rasionalitas individu dalam menentukan arah dan tujuan tindakannya.

Lebih lanjut, prinsip utama dari Rational Choice Theory memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjelaskan fenomena sosial melalui mekanisme pilihan rasional pada tingkat individu (Sato, 2013). Dalam kerangka pemikiran tersebut, rasionalitas berfungsi sebagai faktor penghubung antara perilaku individu dan dampak kolektif yang muncul di tengah masyarakat. Teori ini beroperasi berdasarkan dua mekanisme penting, yakni proses pengambilan keputusan oleh aktor serta dinamika transisi mikro-makro-mikro yang memperlihatkan bagaimana keputusan individual dapat menghasilkan pola-pola sosial dalam lingkup yang lebih luas.

Dengan demikian, penerapan rasionalitas tidak saja berfungsi pada level personal, namun juga berimplikasi pada pembentukan fenomena sosial secara agregat. Hubungan antara individu dan struktur sosial, dalam hal ini, dimediasi oleh tindakan rasional yang didasari pertimbangan logis dan kalkulatif. Proses ini menjadi penting karena secara konseptual menghubungkan dimensi individu dengan transformasi sosial yang lebih besar melalui rangkaian keputusan rasional.

Melalui lensa Rational Choice Theory (RCT), respons strategis Pemerintah Indonesia terhadap tekanan kebijakan RED II Uni Eropa dapat dipahami sebagai upaya rasional yang berdasar pada kalkulasi biaya-manfaat untuk memaksimalkan utilitas nasional. Kebijakan diversifikasi pasar ekspor, misalnya, diambil dengan mengalihkan fokus penjualan CPO ke pasar non-tradisional seperti Tiongkok, India, Afrika, dan Timur Tengah guna mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa. Langkah ini dianggap rasional karena dengan menyebarkan tujuan ekspor, Indonesia dapat meminimalkan potensi kerugian devisa akibat pembatasan Uni Eropa sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik. Selain itu, pemerintah menempuh jalur hukum internasional melalui gugatan resmi ke WTO terhadap kebijakan RED II, yang mencerminkan upaya untuk menekan ‘biaya’ eksternal yang dipaksakan oleh aktor lain Uni Eropa (Baldwin, 1985). Di sisi pasar domestik, Pemerintah Indonesia meningkatkan penggunaan minyak sawit di dalam negeri – antara lain lewat program mandatori biodiesel B30 – sebagai strategi menyerap surplus produksi dan menjaga harga sawit, sehingga dampak penurunan permintaan Eropa dapat diimbangi. Kombinasi langkah-langkah tersebut sejalan dengan asumsi RCT bahwa aktor akan memilih opsi yang paling optimal untuk melindungi kepentingan nasionalnya (Allison & Zelikow, 1999). Dengan kata lain, di tengah kendala eksternal yang ditimbulkan oleh RED II, strategi pemerintah seperti diversifikasi pasar, konfrontasi hukum, dan penciptaan pasar domestik merupakan pilihan rasional yang paling menguntungkan demi mempertahankan stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan jutaan petani sawit Indonesia (Hutagalung, 2024).

Dalam kaitannya dengan pembentukan strategi, Rational Choice Theory menegaskan bahwa strategi yang dipilih oleh aktor tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses kalkulasi yang cermat terhadap berbagai pilihan dan akibat yang ditimbulkannya (Coleman, 1990). Setiap keputusan strategis lahir dari evaluasi rasional yang membandingkan keuntungan marginal dengan biaya potensial dari masing-masing alternatif tindakan. Dalam proses ini, aktor tidak hanya mempertimbangkan preferensi utamanya sendiri, tetapi juga berusaha memprediksi bagaimana pihak lain akan bereaksi, serta mengidentifikasi berbagai kendala eksternal yang mungkin membatasi ruang geraknya (Downs, 1957). Dengan kata lain, strategi merupakan hasil dari serangkaian pertimbangan logis untuk menemukan opsi yang paling menguntungkan dalam situasi tertentu. Karakteristik penting dari pendekatan ini adalah sifatnya yang *purposive*—setiap langkah strategis dipilih karena diyakini sebagai cara paling efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Becker, 1976). Dalam konteks hubungan internasional, hal ini berarti bahwa kebijakan luar negeri dan ekonomi suatu negara dapat dipahami sebagai refleksi dari upaya memaksimalkan kepentingan nasional melalui perhitungan rasional atas peluang dan risiko yang ada di hadapannya.

Selanjutnya, kerangka Rational Choice Theory digambarkan sebagai suatu cara berpikir yang secara eksplisit mengaitkan perilaku individu dengan preferensi serta motivasi masing-masing (Oppenheimer, 2008). Teori ini pada hakekatnya bersifat normatif dan empiris, yakni tidak hanya menawarkan gambaran mengenai bagaimana seharusnya individu berperilaku berdasarkan nilai rasionalitas, namun juga menjelaskan fenomena nyata tentang bagaimana individu pada kenyataannya bertindak dalam berbagai konteks sosial.

Konsep preferensi dalam teori ini merupakan aspek fundamental, sebab seluruh tindakan dan pilihan individu dipandang sebagai refleksi atas prioritas pribadi yang tersusun secara hierarkis berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing individu. Penekanan pada konsep perilaku yang memiliki tujuan (*purposeful behavior*) menjadi karakteristik utama Rational Choice Theory. Implikasi logis dari pendekatan ini adalah bahwa seluruh proses

pengambilan keputusan pada akhirnya bermuara pada adanya motivasi dan tujuan yang diinternalisasi oleh aktor.

Di sisi lain, kritikan terhadap definisi Rational Choice Theory mencuat terutama berkaitan dengan keterbatasan asumsi dasar yang dianut oleh teori ini (Archer & Tritter, 2000). Kritik tersebut menyoroti aspek rasionalitas yang dianggap mengabaikan peran emosi dan norma, serta kecenderungan teori ini yang terlalu menekankan individualisme sehingga gagal melihat signifikansi struktur sosial. Lebih lanjut, asumsi temporalitas dalam teori ini dianggap tidak memadai dalam merespons perubahan preferensi individu dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, definisi dari Rational Choice Theory tidak sepenuhnya bebas dari perdebatan dan penyesuaian, terutama dalam menghadapi kritik terkait relevansi dengan fenomena sosial yang semakin kompleks. Permasalahan mendasar pada ranah definisi ini mendorong pengembangan kerangka dan konsep baru agar bisa lebih adaptif dengan dinamika sosial kontemporer.

Sebagai respons terhadap keterbatasan definisi klasik Rational Choice Theory, muncul pendekatan baru seperti hyper-rational choice theory yang memperluas spektrum rasionalitas individu dengan mempertimbangkan kepentingan kolektif (Gordji & Askari, 2018). Dalam paradigma ini, tindakan individu tidak hanya diorientasikan pada perhitungan untung rugi pribadi, melainkan juga melibatkan pertimbangan atas hasil yang berpengaruh pada aktor lainnya. Konsep tersebut menambah lapisan kompleksitas terhadap definisi awal Rational Choice Theory, dengan menyoroti adanya interaksi dan keterkaitan antara motif personal dan tanggung jawab sosial.

Penyempurnaan definisi melalui pendekatan ini memperlihatkan perkembangan konsep rasionalitas dari dimensi individualis menuju perspektif yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, definisi Rational Choice Theory senantiasa mengalami evolusi sesuai tantangan perubahan sosial dan kebutuhan konseptual dalam ilmu sosial modern. Dalam konteks penelitian ini, Teori Pilihan Rasional (RCT) diterapkan dengan memosisikan Pemerintah

Indonesia sebagai aktor rasional (unitary rational actor) (Allison & Zelikow, 1999). Aktor ini diasumsikan bertindak secara strategis dengan preferensi (tujuan) yang teratur dan jelas, yaitu memaksimalkan utilitas kepentingan nasional. Utilitas tersebut secara spesifik diartikan sebagai upaya mencapai stabilitas ekonomi makro, yang diukur melalui keberlanjutan penerimaan devisa negara dan perlindungan terhadap stabilitas sosial-ekonomi jutaan petani sawit.

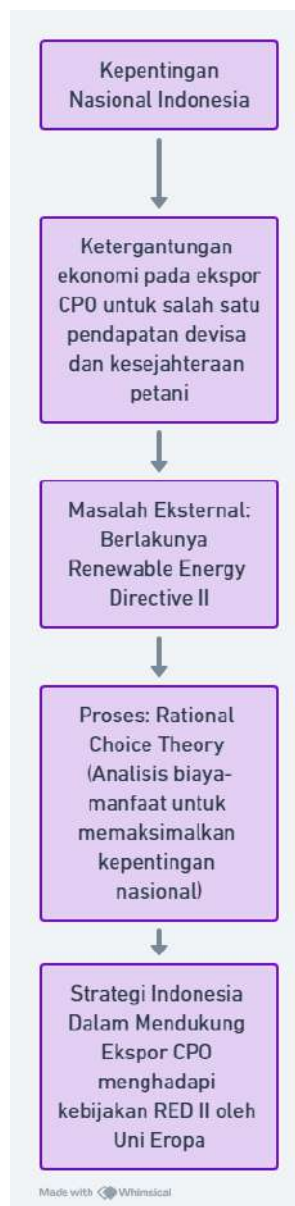
Selanjutnya, konsep sentral yang akan digunakan adalah kendala (constraint). Kebijakan RED II Uni Eropa dioperasionalkan sebagai 'biaya' (cost) yang dipaksakan secara eksternal oleh aktor lain (Uni Eropa) (Baldwin, 1985). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan logika kalkulasi biaya-manfaat (cost-benefit analysis) untuk menjelaskan mengapa respons kebijakan spesifik yang diambil Indonesia—seperti diversifikasi pasar, konfrontasi hukum, atau penciptaan pasar domestik— merupakan pilihan strategis yang paling optimal untuk memaksimalkan utilitas nasional di tengah struktur biaya paksaan tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Inti permasalahan penelitian ini adalah meningkatnya hambatan proteksionisme perdagangan dari Uni Eropa khususnya melalui kebijakan Uni Eropa seperti RED II yang berdampak signifikan terhadap ekspor dan stabilitas perekonomian Indonesia di sektor CPO . Dampak tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi iklim investasi, kesejahteraan petani, serta posisi tawar Indonesia di pasar global. Untuk memahami respons kebijakan pemerintah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan perspektif Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) sebagai kerangka analisis menggambarkan bagaimana aktor negara menimbang alternatif kebijakan secara rasional demi memaksimalkan kepentingan nasional di bawah tekanan eksternal. Secara metodologis, penelitian mengandalkan studi pustaka dan analisis dokumen; dokumen resmi yang dianalisis meliputi naskah regulasi utama (RED II, Perpres ISPO, putusan WTO DS593), sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal akademik, laporan think-tank, dan statistik perdagangan.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendukung dan mempertahankan ekspor CPO di tengah meningkatnya tekanan kebijakan RED II yang berimplikasi proteksionis, terutama kebijakan RED II dan EUDR Uni Eropa. Fenomena ini membentuk dilema strategis: di satu sisi terdapat kebutuhan mendesak untuk mempertahankan penerimaan dan kesejahteraan domestik melalui ekspor; di

sisi lain terdapat pembatasan eksternal yang membatasi ruang kebijakan nasional. Dengan menempatkan negara sebagai aktor rasional, studi ini mengeksplorasi mekanisme pengambilan keputusan, prioritas opsi kebijakan, serta implikasi pelaksanaan strategi baik di ranah domestik maupun diplomasi perdagangan sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tekanan internasional.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam strategi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggapi tekanan kebijakan RED II terhadap ekspor CPO oleh Uni Eropa. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial kebijakan secara mendalam, bukan sekadar menganalisis data kuantitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang *“mengeksplorasi dan memahami makna”* dalam konteks individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif sangat tepat untuk menggambarkan penerapan kebijakan RED II sebagai instrumen hambatan non-tarif dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjelaskan proses kebijakan dan konteksnya dalam *“kehidupan nyata”* secara detail, dengan menekankan narasi dan data kualitatif agar gambaran fenomena yang dihasilkan lebih kaya dan kontekstual.

Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini juga menerapkan metode analisis dokumen karena relevan dengan karakteristik kajian fenomena kebijakan tertentu. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi suatu situasi atau fenomena tertentu dalam batasan yang jelas, baik dalam ruang maupun waktu. Dengan fokus pada kebijakan RED II Uni Eropa CPO yang bersifat kontemporer dan terikat konteks kebijakan, studi kasus memudahkan peneliti menelusuri perkembangan dan dinamika kebijakan secara mendalam. Metode analisis dokumen data sekunder

menuntut pengumpulan data rinci dan mendalam dari berbagai sumber informasi (misalnya dokumen kebijakan, wawancara, laporan media) untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu, kombinasi kualitatif deskriptif dan studi kasus dipilih agar peneliti dapat menelusuri dinamika strategi kebijakan pemerintah secara sistematis dan menyeluruh, sesuai prinsip metodologis yang ditegaskan oleh Creswell dan Poth.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional (stabilitas devisa dan kesejahteraan petani kelapa sawit) di tengah meningkatnya tekanan perdagangan kebijakan RED II berbasis isu lingkungan dari Uni Eropa. Dengan kerangka Pilihan Rasional, negara diperlakukan sebagai aktor tunggal rasional yang mengevaluasi biaya-manfaat setiap opsi kebijakan. Misalnya, Indonesia menempuh jalur hukum internasional dengan mengajukan sengketa WTO (DS593) sejak Desember 2019 sekaligus memperluas kebijakan domestik pro-sawit seperti perluasan mandatori biodiesel B30 (kelak B35/B40) untuk menyerap produksi dalam negeri. Tindakan tersebut menggambarkan kalkulasi strategis pemerintah, yang mengombinasikan litigasi eksternal dan kebijakan domestik untuk memaksimalkan utilitas nasional sesuai teori. Dengan aktor utama Pemerintah Indonesia (eksekutif-legislatif) sebagai unitary rational actor, serta pihak domestik seperti asosiasi produsen (GAPKI, petani sawit) dan aktor eksternal (Uni Eropa, WTO). Dalam periode ini, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi multigaris: meningkatkan konsumsi domestik lewat kenaikan mandat biodiesel (dari B30 ke B35 dan direncanakan B50), mendiversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non- Uni Eropa seperti Tiongkok dan India, serta menempuh jalur diplomasi dan litigasi perdagangan internasional.

Analisis akan melihat bagaimana kombinasi kebijakan – didasarkan pada pertimbangan rasional kepentingan nasional – tersebut dipilih dan diimplementasikan untuk menyeimbangkan tekanan kebijakan RED II dan

regulasi turunannya eksternal dengan kebutuhan ekonomi domestik.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan analisis dokumen. Studi pustaka dilaksanakan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun publikasi akademik yang membahas isu-isu seperti proteksionisme, diplomasi ekonomi, serta tata kelola perdagangan internasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh fondasi teoritis dan konseptual yang kuat, serta memahami posisi penelitian ini dalam konteks studi-studi sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Creswell (2016), penelitian kualitatif memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk teks dan dokumen, yang dianalisis secara mendalam guna mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, studi pustaka memberikan landasan konseptual sekaligus pijakan metodologis bagi penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis dokumen terhadap sumber-sumber resmi dan publikasi kebijakan. Dokumen-dokumen yang dianalisis mencakup regulasi Uni Eropa seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR), serta kebijakan nasional Indonesia seperti Peraturan Presiden mengenai *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan putusan hukum internasional dalam kasus sengketa WTO DS593. Analisis ini diperkuat dengan kajian terhadap laporan-laporan lembaga riset, publikasi dari organisasi internasional seperti *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui teknik ini, penelitian mampu menggali informasi yang relevan secara sistematis mengenai dinamika fenomena penerapan RED II dan strategi respons kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi pustaka (library research) dan analisis dokumen. Data sekunder

mencakup berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik berupa dokumen resmi pemerintah, literatur akademik, maupun publikasi dari lembaga penelitian. Dokumen resmi yang dianalisis mencakup regulasi Uni Eropa seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR), regulasi nasional Indonesia seperti Peraturan Presiden tentang *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), serta dokumen hukum internasional seperti putusan WTO DS593 antara Indonesia dan Uni Eropa. Dokumen-dokumen tersebut memberikan landasan normatif sekaligus bukti empiris atas dinamika kebijakan RED II yang memengaruhi ekspor CPO Indonesia.

Selain dokumen resmi, data sekunder yang penulis kumpulkan juga mencakup literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu-isu seperti kebijakan RED II, proteksionisme, diplomasi perdagangan, dan tata kelola industri sawit berkelanjutan. Laporan dari lembaga penelitian, *think tank*, dan publikasi organisasi internasional seperti *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), turut dijadikan sebagai referensi. Di samping itu, berita dari media kredibel dan laporan kebijakan juga digunakan untuk melengkapi konteks analisis. Dengan menggabungkan berbagai sumber sekunder tersebut, penelitian ini memiliki landasan empiris yang kuat dan komprehensif dalam menjelaskan strategi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam merespons tekanan kebijakan RED II dan regulasi turunannya dari Uni Eropa terhadap ekspor CPO.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen, yaitu telaah mendalam terhadap dokumen kebijakan, regulasi, dan literatur akademik yang berkaitan dengan Kebijakan RED II terhadap ekspor CPO. Data sekunder dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, & Saldaña (2014) yang membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahap interaktif: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Studi dokumen memungkinkan peneliti memahami kebijakan dari

perspektif resmi seperti undang-undang, peraturan menteri, dan pernyataan organisasi internasional (misalnya WTO atau IEU-CEPA) serta menelaah literatur pendukung. Ketiga tahap ini diterapkan secara sistematis, dimulai dari penyaringan informasi yang relevan (reduksi data), penyusunan temuan secara terstruktur, hingga penyimpulan dan verifikasi silang. Pendekatan ini memfasilitasi pemilahan informasi penting mengenai strategi kebijakan Indonesia dalam merespons Kebijakan RED II ekspor CPO di Uni Eropa, serta memastikan bahwa hasil analisis valid dan kredibel.

Tahap pertama yang dilakukan penulis adalah reduksi data, yakni menyeleksi bagian dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, merangkum poin-poin penting, serta melakukan open coding awal untuk mengidentifikasi tema seperti proteksionisme, diversifikasi pasar, dan litigasi internasional (Miles et al., 2014). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik, tabel komparatif, dan matriks kebijakan kronologis agar pola-pola kebijakan dan keterkaitan antar-tema dapat terlihat secara jelas. Penyajian ini memudahkan pembacaan serta perbandingan antara sumber data.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana penulis menyintesis temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi, literatur akademik, dan laporan dari lembaga terkait serta pemeriksaan konsistensi antar-tema dan pencatatan audit trail guna memastikan keterlacakan analisis. Pendekatan iteratif ini memungkinkan penulis menafsirkan strategi kebijakan Indonesia (dalam kerangka Rational Choice) berdasarkan bukti dokumen yang kuat, sekaligus memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian (Miles et al., 2014).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa menjadi external constraint yang mendorong Pemerintah Indonesia melakukan berbagai penyesuaian strategi untuk mempertahankan utilitas nasional sektor kelapa sawit. Kebijakan tersebut tidak hanya menurunkan akses pasar CPO Indonesia di Uni Eropa, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas devisa negara, keberlanjutan ekspor, serta kesejahteraan jutaan petani sawit domestik. Dalam menghadapi tekanan tersebut, Pemerintah Indonesia bertindak sebagai aktor rasional sebagaimana dijelaskan dalam Rational Choice Theory (RCT), yakni dengan melakukan kalkulasi biaya dan manfaat terhadap berbagai alternatif kebijakan yang tersedia guna memilih strategi paling optimal bagi kepentingan nasional.

Melalui perspektif Rational Choice Theory, keputusan utama Indonesia bukan hanya melakukan konfrontasi hukum melalui gugatan ke WTO, tetapi juga secara rasional mengalihkan orientasi pasar ekspor melalui strategi diversifikasi pasar ke kawasan non-tradisional seperti China, India, Pakistan, Bangladesh, Timur Tengah, dan Afrika. Strategi ini dipilih karena memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan stabil dibandingkan mempertahankan ketergantungan terhadap pasar Uni Eropa yang semakin restriktif terhadap produk sawit. Diversifikasi pasar dipandang sebagai pilihan rasional untuk mengurangi risiko kerugian devisa akibat hambatan perdagangan Uni Eropa sekaligus menjaga keberlanjutan permintaan ekspor CPO Indonesia di pasar global.

Selain diversifikasi pasar, Indonesia juga memperkuat strategi hilirisasi industri sawit, pengembangan pasar domestik melalui program mandatori biodiesel, penguatan standar keberlanjutan ISPO, digital traceability, serta diplomasi ekonomi bilateral dan multilateral. Seluruh langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perlawanan terhadap kebijakan Uni Eropa, tetapi juga melakukan adaptasi strategis guna meningkatkan daya saing sawit Indonesia dalam struktur perdagangan global yang semakin

menekankan isu keberlanjutan. Dengan demikian, respons Indonesia terhadap RED II mencerminkan perilaku rasional negara dalam memaksimalkan utilitas nasional melalui kombinasi strategi hukum, diplomasi, diversifikasi pasar, dan penguatan tata kelola domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan green protectionism global.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan diversifikasi pasar Indonesia setelah penerapan RED II, khususnya terhadap perubahan volume ekspor, nilai devisa, dan stabilitas harga sawit nasional dalam jangka panjang.

Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menggunakan data primer seperti wawancara dengan pemerintah, asosiasi industri sawit, eksportir, maupun petani sawit, sehingga analisis mengenai proses perumusan kebijakan dan dampak nyata hambatan perdagangan dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

Dari sisi praktis, pemerintah Indonesia perlu terus memperluas pasar ekspor non-Uni Eropa, memperkuat implementasi ISPO, meningkatkan hilirisasi industri sawit, serta memperkuat diplomasi perdagangan internasional agar daya saing sawit Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya tren proteksionisme berbasis lingkungan di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Advanced Biofuels USA. (2025, Januari 10). *WTO Panel Issues Report Regarding EU Measures Affecting Palm Oil Biofuels from Indonesia* [News Analysis]. Advanced Biofuels USA. <https://advancedbiofuelsusa.info/wto-panel-issues-report-regarding-eu-measures-affecting-palm-oil-biofuels-from-indonesia>
- Aliza, D. (2024). Kepentingan Nasional Indonesia dengan China dalam Menyepakati Kerja Sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Tahun 2020. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2435>
- Anam, K., Fauzi, A., Amir, I. T., & Hendrarini, H. (2024). Impact Of EU's RED Policy On The Performance Of Indonesian Palm Oil Company. *YMER*, 23(01), 1065–1084.
- Andrianto, S. (2020). SENGKETA EUROPEAN UNION DAN REPUBLIK INDONESIA PASAL 26 RED II DAN WTO. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(01), 59–80. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2181>
- Antara News. (2025, Januari 18). *Indonesia Welcomes WTO Ruling on EU Curbs on Palm Oil Biofuel* [News Article (Republished)]. Bilaterals.org. <https://www.bilaterals.org/?indonesia-welcomes-wto-ruling-on>
- Astra Agro Lestari. (2023, April 19). *Indonesia's Palm Oil Export to China, Bangladesh on Rise* [News Article]. PT Astra Agro Lestari Tbk. <https://www.astra-agro.co.id/2023/04/19/indonesias-palm-oil-export-to-china-bangladesh-on-rise/>
- Arieza, U. (2019, 03 18). *Polemik Uni Eropa Hapus Sawit Ancam Ekspor RI*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190315140949-377574/polemik-uni-eropa-hapus-sawit-ancam-ekspor-ri>
- Azhar, B. (2021). Mitigating the risks of indirect land use change (ILUC) related deforestation from industrial palm oil expansion by sharing land access with displaced crop and cattle farmers. *Land Use Policy*, Volume 107.

- Azzahra, A., Agustin, G., Surya, M., & Marlina, R. (2025). Perkembangan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia menuju Tiongkok (Implementasi ASEAN-China Free Trade Area). *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 76–85. <https://doi.org/10.63822/s4mrjh51>
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2023). *Laporan Kinerja (LAKIN) BPD PKS Tahun 2023* [Laporan Kinerja]. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bilaterals.org. (2025, Desember 21). *Indonesia, Pakistan Negotiating on FTA for Promoting Trade* [News Article]. Bilaterals.org. <https://www.bilaterals.org/?indonesia-pakistan-negotiating-on>
- BPDP. (2019a, Februari 20). *Indonesia-India Gelar Forum Bisnis Kelapa Sawit di New Delhi*. BPDP. <http://www.bdp.or.id/Indonesia-India-Gelar-Forum-Bisnis-Kelapa-Sawit-di-New-Delhi>
- BPDP. (2019b, Mei 8). *Pakistan, Gerbang Perluasan Pasar Sawit Indonesia*. BPDP. <http://www.bdp.or.id/Pakistan-Gerbang-Perluasan-Pasar-Sawit-Indonesia>
- BPDP. (2024, September 26). *Indonesia Tegaskan Komitmen Sawit Berkelanjutan di CAEXPO ke-21 di Nanning, Tiongkok*. BPDP. <http://www.bdp.or.id/indonesia-tegaskan-komitmen-sawit-berkelanjutan-di-caexpo-ke-21-di-nanning-tiongkok>
- BPDP. (2025, Juli 24). *Promosikan Inovasi Sawit dan Dukungan pada UMKM, BPDP Hadir di FHI 2025*. BPDP. <http://www.bdp.or.id/promosikan-inovasi-sawit-dan-dukungan-pada-umkm-bdp-hadir-di-fhi-2025>
- BPKP. (2025, Desember 9). *PM Pakistan Shehbaz Sharif: Kunjungan Presiden Prabowo Perkuat Persahabatan dan Kerja Sama Strategis Indonesia-Pakistan* [Government News]. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. <https://bpkp.go.id/id/berita/oJkP/pm-pakistan-shehbaz-sharif-kunjungan-presiden-prabowo-perkuat-persahabatan-dan-kerja-sama-strategis-indonesia-pakistan>
- CIFOR-ICRAF. (2024, Maret). *Scaling Jurisdictional Approaches in the Indonesian Palm Oil Sector*. Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF). <https://www.cifor-icraf.org/project/scaling-JA-palmoil/>
- CNBC Indonesia. (2025, Desember 9). *Di Depan Prabowo, PM Pakistan Ingin Genjot Ekspor Produk Ini ke RI* [News Article]. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251209171912-4-692633/di-depan-prabowo-pm-pakistan-ingin-genjot-ekspor-produk-ini-ke-ri>

- Department of Commerce, Government of India. (2025). *India-Indonesia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)* [Government Webpage]. Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. <https://www.commerce.gov.in/international-trade-trade-agreements-indias-current-engagements-in-rtas/india-indonesia-comprehensive-economic-cooperation-agreement-ceca/>
- Dr. Andi Fahmi Lubis, S. M. (2009). *Hukum Antara Teks & Konteks Persaingan Usaha*. Jakarta: GIZ.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023, Oktober 7). *Lewat CPOPC Joint Mission di India, Kementan Mendorong Kampanye Positif Sawit dan Pentingnya Pengakuan ISPO* [Press Release]. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/lewat-cpopc-joint-mission-di-india-kementan-mendorong-kampanye-positif-sawit-dan-pentingnya-pengakuan-ispo/>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2024, Februari 7). *Pemerintah Indonesia Dorong Dashboard Komoditas Sebagai Alat Ketertelusuran yang Terintegrasi* [Press Release]. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/pemerintah-indonesia-dorong-dashboard-komoditas-sebagai-alat-ketertelusuran-yang-terintegrasi/>
- Elaeis.co. (2025a). *Begini Cara BPDP Angkat UKMK Sawit ke Panggung Internasional* [Online News Article]. Elaeis.co. <https://www.elaeis.co/berita/baca/begini-cara-bpdp-angkat-ukmk-sawit-ke-panggung-internasional>
- Elaeis.co. (2025b). *Sawit Indonesia Dominasi India, Ekspor 2025 Catat Rekor Fantastis* [Online News Article]. Elaeis.co. <https://www.elaeis.co/berita/baca/sawit-indonesia-dominasi-india-ekspor-2025-catat-rekor-fantastis>
- Erixon, F. (2012). The Rising Trend of Green Protectionism: Biofuels and the European Union. European Centre for International Political Economy, 3-33.
- European Commission. (2025). *WT/DS593: European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels*. European Commission. https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/dispute-settlement/wto-dispute-settlement/wto-disputes-cases-involving-eu/wtds593-european-union-certain-measures-concerning-palm-oil-and-oil-palm-crop-based-biofuels_en

- European Forest Institute. (2024a). *ISPO Certification for Smallholders: Process and Challenges* [Policy Brief]. European Forest Institute. https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Terpercaya/Briefings/Overview_ISPO_Certification_smallholders_EN.pdf
- European Forest Institute. (2024b). *Strengthening the Collection of Palm Oil Supply Chain Traceability Information in Indonesia* [Policy Brief]. European Forest Institute. https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Terpercaya/Briefings/Traceability_Regulations.pdf
- European Union. (2018, 12 11). Directive (EU) 2018/2001. From EUR Lex: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj/eng>
- European Union. (2019, 03 13). COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/807. From EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj/eng
- European Union. (2019). The European Green Deal. From European Commission: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
- Farhan, M. A., Risnain, M., & Nugraha, L. G. (2025). Penyelesaian Sengketa Ekspor Minyak Kelapa Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa pada Kasus DS593. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1–29.
- Feige, A. (2019). *Implications of the RED II Regulation for Palm Producers with Specific Focus on Low iLUC-risks Certification Requirements* [Technical Presentation/Report]. ISCC System GmbH. <https://www.iscc-system.org/>
- Forest Digest. (2024, Januari 7). *Panggilan Hijau dari Tiongkok* [Kabar Baru]. Forest Digest. <https://www.forestdigest.com/detail/2490/ekspor-sawit-tiongkok>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (2025, Agustus 25). Palm Oil in 2025: Driving India-Indonesia Trade & Sustainable Growth. *Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)*. <https://gapki.id/en/news/2025/08/25/palm-oil-in-2025-driving-india-indonesia-trade-sustainable-growth/>
- Habibi, M. A. & Sishidayati. (2023). Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia: Analisis Kasus ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 442–449. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10078240>
- IKPI. (2025, Februari 25). Kenaikan Pajak Impor CPO India Berpotensi Menekan Ekspor Sawit Indonesia. *Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*. <https://ikpi.or.id/kenaikan-pajak-impor-cpo-india-berpotensi-menekan-ekspor-sawit-indonesia/>

Indonesia Business Post. (2025, Februari 25). *Indonesia Wins at WTO, EU Must "Adjust Palm Oil Policy"* [News Article]. Indonesia Business Post. <https://indonesiabusinesspost.com/3679/markets-and-finance/indonesia-wins-at-wto-eu-must-adjust-palm-oil-policy>

Indonesia Palm Oil. (2025). *The Facts On Palm*. <https://indonesiapalmoilfacts.com>
 InfoSAWIT. (2025, Oktober 28). *Ekspor Sawit Indonesia ke Pakistan Turun Tipis, Malaysia Justru Catat Kenaikan* [News Article]. InfoSAWIT. <https://www.infosawit.com/2025/10/28/ekspor-sawit-indonesia-ke-pakistan-turun-tipis-malaysia-justru-catat-kenaikan/>

International Poverty Reduction Center in China. (2024, Januari 4). *RCEP Boosts Trade Cooperation between China, Indonesia* [Online Article]. International Poverty Reduction Center in China (IPRCC). <https://www.iprcc.org/article/4GCGjusUDVu>

Jovannellha, R. D. (2025). IMPLIKASI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA PASCA PUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION. *Jurnal Kritis*, 18-28.

Kantor Berita Sawit Indonesia. (2025). *Bangladesh Takut Gak Kebagian Sawit dari Indonesia, Ini Sebabnya* [News Article]. Kantor Berita Sawit Indonesia. <https://sawitindonesia.com/bangladesh-takut-gak-kebagian-sawit-dari-indonesia-ini-sebabnya/>

Karim, M. F., & Tiffani, C. (2023). The Limits of Indonesia and India Trade Cooperation: The Case of Import Tariffs on Refined Palm Oil 2019–2020. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 11(1), 31–43. <https://doi.org/10.1017/trn.2022.2>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). *Perdagangan Tumbuh 20% Setiap Tahun, Menko Airlangga: Perlu Bangun Jembatan antara Made in Indonesia dan Made in India*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6094/perdagangan-tumbuh-20-setiap-tahun-menko-airlangga-perlu-bangun-jembatan-antara-made-in-indonesia-dan-kementerian-luar-negeri-republik-indonesia>, Hamzah, T. N., Suharto, E.,

Rifai, D. A., Widyastutik, Novianti, T., & Rifin, A. (2023). *Reviu Kebijakan Kemitraan: Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk Peningkatan Perdagangan Indonesia dengan Lima Negara RCEP Non-ASEAN* [Laporan Akhir Policy Review]. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019, Maret 1). *IP-PTA: Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement* [Government Webpage]. FTA Support Center, Kementerian Perdagangan

- RepublikIndonesia. <https://ftasupportcenter.kemendag.go.id/ip-pta>
Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023, Oktober 7). *Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan: LEWAT CPOPC JOINT MISSION DI INDIA, KEMENTAN MENDORONG KAMPANYE POSITIF SAWIT DAN PENTINGNYA PENGAKUAN ISPO.*
<https://ditjenbun.pertanian.go.id/lewat-cpopc-joint-mission-di-india-kementan-mendorong-kampanye-positif-sawit-dan-pentingnya-pengakuan-ispo/>
- Keyzer, M. A. (2008). *The Biofuel Controversy*. Centre for World Food Studies.
- Kontan Pusat Data. (2024). *Volume Ekspor CPO dan Turunannya Tahun 2024* [Infographic].Kontan.co.id.
<https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/42/Volume-Ekspor-CPO-dan-Turunannya-Tahun-2024>
- Kristoufek, L. (2013). Biofuels: Policies and impacts. *Agricultural Economics (AGRICECON)* , 327-386.
- Mayr, S. (2020). Palm oil, the RED II and WTO law: EU sustainable biofuelpolicy tangled up in green? *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 233-248.
- Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. (2023, Februari 28). *SustainPalm: Indonesia and the Netherlands cooperation on sustainable palm oil | Agroberichten Buitenland*. Agroberichten Buitenland.
<https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2023/02/28/sustain-palm---indonesia-and-the-netherlands-cooperation-on-sustainable-palm-oil>
- Matthews, H. D. (2016). Quantifying historical carbon and climate debts among nations. *Nature Climate Change*, 60-64.
- Musim Mas. (2025). *Smallholders* [Corporate Sustainability Page]. Musim Mas.
<https://www.musimmas.com/sustainability/smallholders/>
- Muzahid, A. (2024). Strategi perdagangan internasional sawit Indonesia menghadapi penerapan renewable energy directive (RED) oleh Uni Eropa (UE) dengan pendekatan intelijen kompetitif. *Journal Of National Paradigm- Based Resilience Strategy*, 152-170.
- Natalia, D. L. (2025, Oktober 17). *RI-China Sepakati 9 Kesepakatan Dagang dalam Trade Expo Indonesia 2025* [News Article]. ANTARA News.
<https://www.antaranews.com/berita/5182393/ri-china-sepakati-9-kesepakatan-dagang-dalam-trade-expo-indonesia-2025>
- Pasardana.id. (2025, Desember 10). *Pertemuan Prabowo-PM Pakistan Sepakati 7 Kerja Sama di Berbagai Sektor* [News Article]. Pasardana.id.
<https://pasardana.id/news/2025/12/10/pertemuan-prabowo-pm-pakistan-sepakati-7-kerja-sama-di-berbagai-sektor/>

- Permitindo. (2025). *ISPO 2025: Mandatory Palm Oil Certification in Indonesia* [Business Advisory Article]. Permitindo. <https://www.permitindo.com/news/ispo-mandatory-palm-oil-certification>
- Pratama, K. P. M. P., Sukmawati, C. P., & Abidin, A. Z. (2024). Global Dominance in Crude Palm Oil (CPO): Strategic Factors Shaping Indonesia's Competitive Edge-A Panel Data Approach. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 18(2), 141–158. <https://doi.org/10.55981/bilp.2024.7205>
- Primayanti. (2025, Juli 2). *CPO still Indonesia's leading export commodity: BPS*. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/363345/cpo-still-indonesias-leading-export-commodity-bps>
- Quist, Z. (2024, 02 03). *Life Cycle Assessment (LCA) – Everything you need to know*. Retrieved from Ecochain: <https://ecochain.com/blog/life-cycle-assessment-lca-guide/>
- Ramdan, D. M. (2025, Februari 23). *India Kembali Menaikkan Pajak Impor CPO, Ini Dampaknya ke Indonesia*. kontan.co.id. <https://industri.kontan.co.id/news/india-kembali-menaikkan-pajak-impor-cpo-ini-dampaknya-ke-indonesia>
- Rais, M. L. (2023). Dampak Diskriminasi Kebijakan Perdagangan Sawit Uni Eropa Terhadap. *POLISTAAT*, 12-22.
- Revo M. (2025, Januari 23). *RI Cuan Rp 325 T dari CPO, Devisanya Menguap Entah ke Mana*. CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250123105927-128-605392/ri-cuan-rp-325-t-dari-cpo-devisanya-menguap-entah-ke-mana>
- Shidqie, C. P. (2025, Februari 24). *India Menaikkan Pajak Impor Minyak Nabati, Gapki Desak Pemerintah Berkomunikasi dengan India*. Tax Centre FIA UI. <https://ui.taxcentre.id>
- Sihotang, E. D. (2022). Analysis of Discriminatory Measures from European Union Renewable Energy Directive II to Indonesia as a Palm Oil Producer Country. *Indonesia Law Review*, 12(3), 242–253. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n3.3>
- Soemirat, J. J. (2025). Keberlanjutan VS. Pertumbuhan? Peran Energi Hijau dan Deplesi Sumber Daya di Ekonomi G20 Dan Uni Eropa. *Himie Economics Research And Olympiad*.
- Solidaridad Asia. (2019, Februari 23). *SOLIDARIDAD PARTICIPATES IN 4TH INDIA ASEAN SUMMIT*. Solidaridad Asia. <https://solidaridadsseablog.wordpress.com/2019/02/23/solidaridad-participates-in-4th-india-asean-summit/>

- SPOS Indonesia and Yayasan Kehati. (2022). *The Comparison of ISPO and RSPO Certification to Achieve Sustainable Palm Oil Production in Indonesia* [Information Brief]. Strengthening Palm Oil Sustainability (SPOS) Indonesia and Yayasan Kehati. https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2022/06/Information-Brief_THE-COMPARISON-OF-ISPO-and-RSPO-SPOSI-KEHATI.pdf Stockbit Investment Research. (2024, September 20). *Pemerintah Turunkan Tarif Pungutan Ekspor CPO* [Market Analysis]. PT Stockbit Sekuritas Digital. <https://snips.stockbit.com/snips-terbaru/pemerintah-turunkan-tarif-pungutan-ekspor-cpo>
- Tampubolon, B. I., Hastuti, Firdaus, M., Anggraeni, L., & Muna, N. (2022). Kinerja Ekspor Indonesia dan Persepsi Konsumen Pakistan terhadap Minyak Sawit dan Produk Turunannya. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 16(1), 41–58. <https://doi.org/10.30908/bilp.v16i1.692>
- Tampubolon, D. K. (2025). DAMPAK PENETAPAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) YANG DILAKUKAN UNI EROPA TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA TAHUN 2019–2022. *Global Insight Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*.
- Tempo English. (2025a, Januari). *Indonesia Wins WTO Case Against EU Over Palm Oil Discrimination, Boosting Energy Sovereignty* [News Article]. Tempo Media Group. <https://en.tempo.co/read/1965517/indonesia-wins-wto-case-against-eu-over-palm-oil-discrimination-boosting-energy-sovereignty>
- Tempo English. (2025b, Agustus 28). *Indonesia Confident in Biodiesel Export Growth After WTO Win Over EU* [News Article]. Tempo Media Group. <https://en.tempo.co/read/2044064/indonesia-confident-in-biodiesel-export-growth-after-wto-win-over-eu>
- The Express Tribune. (2025). *Deepening Pak-Indonesia Ties* [Opinion Article]. The Express Tribune. <https://tribune.com.pk/story/2582195/deepening-pak-indonesia-ties>
- The Jakarta Post. (2019, September 19). *Indonesia to prioritize imports of meat, rice, raw sugar from India in exchange for lower CPO tariff—Business*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/19/indonesia-to-import-buffalo-meat-rice-raw-sugar-from-india-in-exchange-for-lower-cpo-tariff.html>
- Tjokrosetio, D. (2021, Februari 13). *INDONESIA DAN MALAYSIA BEREPUT PASAR SAWIT INDIA* [ICDX]. INDONESIA DAN MALAYSIA BEREPUT PASAR SAWIT INDIA. <https://www.icdx.co.id/news-detail/:category?/:slug?>

Trade Map. (2025). *Trade Map—List of importing markets for a product exported by Indonesia*. Trade Map. https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c%7c1511%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

TradeInt. (2025, Agustus 14). *India Imports Palm Oil From Which Country 2024-2025*. <https://tradeint.com/insights/india-imports-palm-oil-from-which-country-2024-2025/>

Tropical Forest Alliance. (2024). *China Programme* [Program Page]. Tropical Forest Alliance, World Economic Forum. <https://www.tropicalforestalliance.org/china>

Tropical Forest Alliance. (2025, Mei 27). *Indonesia and China Dialogue on Sustainable Palm Oil Trade* [Social Media Post]. Tropical Forest Alliance. https://www.linkedin.com/posts/tropicalforestalliance_yesterday-over-40-stakeholders-from-indonesia-activity-7333389609243992066-l4DQ/
UkrAgroConsult. (2025a). *Bangladesh: Palm Oil Price Worries in Local Market as Indonesia Plans Export Cut* [Market Analysis]. UkrAgroConsult. <https://ukragroconsult.com/en/news/bangladesh-palm-oil-price-worries-in-local-market-as-indonesia-plans-export-cut/>

UkrAgroConsult. (2025b). *Beyond Palm Oil, Pakistan-Indonesia Trade Entering a New Phase* [Market Analysis]. UkrAgroConsult. <https://ukragroconsult.com/en/news/beyond-palm-oil-pakistan-indonesia-trade-entering-a-new-phase/>
UkrAgroConsult. (2025c, Juli). *Indonesia Pushes for South-South Cooperation on Palm Oil Sustainability Standards* [Market Analysis]. UkrAgroConsult. <https://ukragroconsult.com/en/news/indonesia-pushes-for-south-south-cooperation-on-palm-oil-sustainability-standards/>

Union, E. (2009, 04 23). *Renewable Energy Directive*. Retrieved from EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj/eng>

Union, E. (2018, 12 11). *Directive - 2018/2001*. Retrieved from EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj/eng>

Union, E. (2019, 03 13). *Delegated Regulation*. Retrieved from EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj/eng

Warren, L. (2018, Juni 14). *Europeans Agree On 32 Percent Renewables Target And Phaseout Of Palm Oil For Transport By 2030*. *Ecosystem Marketplace*. <https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/europeans-agree-on-32-percent-renewables-target-and-phaseout-of-palm-oil-for-transport-by-2030/>
World Economic Forum. (2023, Juni 27). *Businesses to Drive Green Transition of China's Beef, Paper, Palm Oil and Soy Supply Chains* [Press Release]. World Economic Forum.

<https://www.weforum.org/press/2023/06/businesses-to-drive-green-transition-of-china-s-beef-paper-palm-oil-and-soy-supply-chains/>

World Economic Forum. (2025). *Strengthening Indonesia-China Palm Oil Trade with Sustainable Practices* [Briefing Paper]. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/>

World Trade Organization. (2025). *DS593: European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels*. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm